

Editor: Dr. Andriya Risdwiyanto



Demokrasi Digital

Pendekatan Konseptual

Bambang Arianto, M.A.
Ludiro Madu, M.Si.
Dr. Oktiva Anggraini.

Demokrasi Digital

Pendekatan Konseptual

Demokrasi Digital menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan modern seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Proses politik yang sebelumnya terbatas pada ruang fisik kini meluas ke ranah digital, memungkinkan partisipasi lebih luas dari berbagai lapisan masyarakat. Akses terhadap informasi, interaksi dengan pemangku kebijakan, serta penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien melalui berbagai *platform* digital.

Pemahaman yang baik mengenai Demokrasi Digital diperlukan untuk mengantisipasi tantangan yang muncul, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, polarisasi opini, serta potensi manipulasi algoritma dalam menentukan arus informasi. Literasi digital yang kuat memungkinkan setiap individu untuk berpikir kritis terhadap konten yang dikonsumsi dan berkontribusi secara bertanggung jawab dalam diskusi publik. Penguatan kesadaran terhadap hak dan kewajiban dalam ekosistem digital juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan proses demokrasi yang sehat.

Tanpa pemahaman yang memadai, keterlibatan dalam Demokrasi Digital dapat berujung pada penyalahgunaan informasi atau terperangkap dalam narasi yang menyesatkan. Partisipasi yang berkualitas tidak hanya bergantung pada kebebasan berekspresi, tetapi juga pada kemampuan untuk memilah informasi yang relevan dan mendukung keputusan yang berbasis fakta. Pemanfaatan teknologi secara bijak dapat memperkuat demokrasi dengan menciptakan ruang diskusi yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.



jawarakreasinografi.com
jawarakreasinografi@gmail.com
081-214-839-667



DEMOKRASI DIGITAL: PENDEKATAN KONSEPTUAL

**Bambang Arianto, M.A.
Ludiro Madu, M.Si.
Dr. Oktiva Anggraini, M.Si**



PENERBIT CV. JAWARA KREASINOGRAFI

**DEMOKRASI DIGITAL:
PENDEKATAN KONSEPTUAL**

Penulis : Bambang Arianto, M.A.
Ludiro Madu, M.Si.
Dr. Oktiva Anggraini, M.Si.

Editor : Dr. Andriya Risdwiyanto, M.M.

Desain Sampul : Bekti Handayani

Tata Letak : Nomo Ariawan

ISBN : 978-623-10-9232-8

Diterbitkan oleh : **JAWARA KREASINOGRAFI**
APRIL 2025

Redaksi:

Jalan Lingkungan Tegal Jeruk RT 2 RW 7, Kelurahan Banjarsari,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang
Provinsi Banten Telp. 081-214-839-667
Surel : jawarakreasinografi@gmail.com
Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul *Demokrasi Digital: Pendekatan Konseptual*, sangat penting bagi para akademisi, praktisi maupun mahasiswa sebagai panduan dalam memahami perkembangan kajian Demokrasi Digital.

Demokrasi Digital merupakan transformasi partisipasi politik melalui teknologi digital, sehingga individu dapat menyampaikan aspirasi, mengakses informasi, serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan publik secara lebih cepat dan luas. *Platform* daring, seperti media sosial dan petisi digital, memungkinkan interaksi langsung antara masyarakat dan institusi pemerintahan, menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan inklusif dalam proses demokrasi.

Pemahaman terhadap Demokrasi Digital menjadi esensial karena perkembangan teknologi telah mengubah cara komunikasi politik dan distribusi informasi. Ketidakhahaman akan konsep ini dapat membuka celah bagi disinformasi, manipulasi opini, serta ketimpangan akses terhadap hak berpendapat. Dengan literasi digital yang memadai, setiap individu dapat lebih kritis untuk menyaring informasi serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam ruang demokrasi yang semakin berbasis digital.

Pembahasan dalam buku ini sangat beragam, sebab dimulai dari Konsep Dasar Demokrasi Digital; Teknologi dan Infrastruktur dalam Demokrasi Digital; Partisipasi Publik dalam Demokrasi Digital; Pengaruh Media dan Disinformasi dalam Demokrasi Digital; Regulasi dan Etika dalam Demokrasi Digital; Dampak Demokrasi Digital bagi Kewargaan dan Pemerintahan.

Penulis merasa bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga tetap diperlukan berbagai masukan baik saran dan kritik yang konstruktif. Semoga buku ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih yang signifikan bagi perkembangan kajian Demokrasi Digital.

Serang, April 2025

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| PRAKATA | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB 1 KONSEP DASAR DEMOKRASI DIGITAL | 1 |
| A. Pendahuluan | 1 |
| B. Definisi dan Evolusi Demokrasi Digital | 3 |
| C. Prinsip-Prinsip Demokrasi Era Digital | 6 |
| D. Peran Teknologi dalam Transformasi Demokrasi | 8 |
| E. Demokrasi Digital versus Demokrasi Konvensional | 10 |
| F. Model Demokrasi Digital di Berbagai Negara | 11 |
| BAB 2 TEKNOLOGI DAN INFRASTRUKTUR DALAM DEMOKRASI DIGITAL | 14 |
| A. Pendahuluan | 14 |
| B. Sistem Elektronik untuk Pemilu dan Partisipasi Politik | 16 |
| C. Peran <i>Big Data</i> dan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Demokrasi Digital..... | 18 |
| D. <i>Blockchain</i> dan Transparansi dalam Pemilu Digital | 21 |
| E. Infrastruktur Digital dan Kesenjangan Teknologi | 23 |
| F. Regulasi Teknologi dalam Demokrasi Digital..... | 25 |
| BAB 3 PARTISIPASI PUBLIK DALAM DEMOKRASI DIGITAL | 28 |
| A. Pendahuluan | 28 |
| B. Media Sosial sebagai Sarana Partisipasi Publik | 30 |
| C. <i>E-Participation</i> dan Keterlibatan Warga Negara | 32 |
| D. Petisi Online dan Mobilisasi Politik Digital | 35 |
| E. Kampanye Politik di Era Digital..... | 38 |
| F. Peran <i>Influencer</i> dan Aktivitas Digital dalam Demokrasi..... | 40 |
| G. Tantangan Partisipasi Digital bagi Kelompok Rentan di Indonesia | 43 |
| BAB 4 PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN DISINFORMASI DALAM DEMOKRASI DIGITAL | 46 |
| A. Pendahuluan | 46 |
| B. Peran Media Sosial dalam Demokrasi | 48 |
| C. Fenomena Fake News dan Manipulasi Informasi | 51 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| | D. Algoritma Media Sosial dan Polarisasi Politik | 53 |
| | E. Antisipasi Hoaks dalam Pemilu Digital..... | 56 |
| | F. Regulasi <i>Platform</i> Digital dalam Disinformasi..... | 58 |
| | G. Literasi Digital sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Publik | 61 |
| BAB 5 | REGULASI DAN ETIKA DALAM DEMOKRASI DIGITAL | 64 |
| | A. Pendahuluan | 64 |
| | B. Kebijakan dan Regulasi Demokrasi Digital di Berbagai Negara | 66 |
| | C. Hak Azazi Manusia dalam Demokrasi Digital | 69 |
| | D. Perlindungan Privasi dan Data dalam Demokrasi Digital..... | 71 |
| | E. Etika Berinternet dalam Ruang Demokrasi Digital ... | 74 |
| | F. Perlindungan Hak Digital dan Kebebasan Berpendapat | 77 |
| | G. Peran Lembaga Pemerintah dalam Mengawasi Demokrasi Digital | 80 |
| BAB 6 | DAMPAK DEMOKRASI DIGITAL BAGI KEWARGAAN DAN PEMERINTAHAN | 83 |
| | A. Pendahuluan | 83 |
| | B. Transformasi Kebijakan Publik dalam Era Digital | 85 |
| | C. Demokrasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan | 88 |
| | D. Demokrasi Digital bagi Kepercayaan Publik | 91 |
| | E. <i>E-Government</i> dan Transparansi dalam Administrasi Publik | 93 |
| | F. Pengaruh Demokrasi Digital terhadap Aktivisme Sosial | 96 |
| | G. Keseimbangan antara Keterbukaan dan Pengendalian dalam Demokrasi Digital | 98 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 102 |
| | TENTANG PENULIS..... | 105 |

BAB

1

KONSEP DASAR DEMOKRASI DIGITAL

A. Pendahuluan

Demokrasi digital merupakan konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses demokrasi, termasuk partisipasi politik, pengambilan keputusan, dan keterlibatan publik dalam pemerintahan. Pemanfaatan teknologi digital dalam konteks demokrasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Dengan semakin berkembangnya internet dan teknologi digital, demokrasi mengalami transformasi yang memungkinkan interaksi lebih luas antara warga negara dengan pemerintah serta antarindividu dalam berbagai forum diskusi publik. Pemahaman terhadap konsep ini menjadi penting karena perubahan yang dibawa oleh digitalisasi telah mengubah cara individu berpartisipasi dalam kehidupan politik. Media sosial, *platform e-government*, dan berbagai aplikasi partisipatif memberikan ruang bagi publik untuk menyuarakan pendapat, mengakses informasi politik, serta berkontribusi dalam pengambilan kebijakan. Teknologi digital juga memberikan peluang bagi kelompok yang sebelumnya sulit mengakses informasi atau berpartisipasi dalam sistem demokrasi konvensional untuk turut serta dalam proses politik.

Selain meningkatkan keterlibatan publik, demokrasi digital juga berkontribusi dalam memperkuat transparansi pemerintahan. Data dan informasi mengenai kebijakan publik

dapat diakses secara lebih terbuka, sehingga memungkinkan pengawasan dari masyarakat. Mekanisme seperti petisi daring, konsultasi publik berbasis digital, serta pemungutan suara elektronik semakin memperluas akses terhadap proses demokrasi. Keberadaan *platform* digital memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat, mempermudah diskusi kebijakan, serta meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang. Namun, meskipun menawarkan berbagai manfaat, demokrasi digital juga menghadapi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Penyebaran misinformasi dan disinformasi dapat mengganggu proses demokrasi dengan membentuk opini publik yang tidak berbasis pada fakta. Manipulasi algoritma dalam media sosial dapat menciptakan ruang gema (*echo chamber*) yang mempersempit sudut pandang individu terhadap isu politik. Selain itu, keamanan siber menjadi aspek krusial dalam demokrasi digital, mengingat ancaman peretasan, pencurian data, serta campur tangan pihak asing dalam proses politik dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem demokrasi digital.

Tantangan lain yang muncul adalah kesenjangan digital, sehingga akses terhadap teknologi tidak merata di berbagai wilayah dan kelompok sosial. Kurangnya literasi digital dapat menghambat pemanfaatan demokrasi digital secara optimal dan menciptakan ketimpangan dalam partisipasi politik. Oleh karena itu, inisiatif edukasi digital dan pembangunan infrastruktur teknologi menjadi langkah penting dalam memastikan demokrasi digital dapat berjalan secara inklusif dan efektif. Dalam konteks global, berbagai negara telah mengadopsi teknologi digital dalam sistem politik dan pemerintahan dengan pendekatan yang beragam. Beberapa negara menggunakan *platform* digital untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, sementara lainnya menerapkan teknologi blockchain dalam sistem pemilu guna meningkatkan transparansi dan keamanan. Inovasi dalam demokrasi digital terus berkembang seiring dengan kemajuan

teknologi, sehingga pemahaman terhadap konsep ini menjadi semakin relevan dalam menghadapi perubahan lanskap politik di era digital.

B. Definisi dan Evolusi Demokrasi Digital

Demokrasi digital merupakan konsep yang menggambarkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses demokrasi, termasuk partisipasi politik, pengambilan keputusan, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Teknologi digital memungkinkan demokrasi berkembang melalui berbagai platform daring yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam kebijakan politik. Menurut Dahlberg (2011), demokrasi digital adalah bentuk demokrasi yang memanfaatkan media digital untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam pemerintahan dan proses politik. Pemanfaatan teknologi dalam demokrasi memungkinkan akses informasi yang lebih luas, partisipasi yang lebih inklusif, serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap institusi pemerintahan.

Perkembangan demokrasi digital tidak hanya terkait dengan penggunaan internet sebagai sarana komunikasi politik, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti keamanan data, regulasi teknologi, serta dampak kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan publik. Teknologi digital memberikan peluang bagi individu untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pemilihan umum secara daring, serta mengakses informasi kebijakan dengan lebih mudah. Dengan demikian, demokrasi digital mencerminkan perubahan fundamental dalam sistem politik yang sebelumnya didominasi oleh proses konvensional yang lebih terbatas dalam hal akses dan interaksi publik.

1. Perkembangan Awal Demokrasi Digital

Konsep demokrasi digital mulai berkembang sejak kemunculan internet pada akhir abad ke-20. Pada tahap awal, teknologi digital hanya digunakan sebagai alat komunikasi tambahan bagi institusi politik dan masyarakat.

Email, situs web pemerintah, dan forum daring menjadi media utama dalam penyebaran informasi politik serta interaksi antara pemilih dan wakil rakyat. Dalam perkembangannya, era Web 2.0 membawa perubahan signifikan dengan hadirnya media sosial, blog politik, serta *platform* interaktif lainnya yang memungkinkan dialog publik lebih dinamis. Salah satu momen penting dalam sejarah demokrasi digital adalah pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2008, sehingga kampanye digital mulai digunakan secara masif untuk menjangkau pemilih dan menggalang dukungan politik. Penggunaan media sosial dalam kampanye politik memungkinkan politisi untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, mengumpulkan data pemilih, serta menyebarkan informasi dengan lebih cepat dan efisien. Fenomena ini menandai awal dari era politik digital, sehingga teknologi informasi menjadi elemen integral dalam strategi politik modern (Chadwick, 2013).

2. Evolusi Demokrasi Digital di Era Modern

Seiring dengan perkembangan teknologi, demokrasi digital terus mengalami transformasi. Implementasi kecerdasan buatan dan analitik data besar telah memperkuat efisiensi sistem demokrasi dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait preferensi politik masyarakat. Algoritma media sosial mampu mengidentifikasi pola perilaku pemilih dan menyajikan konten yang sesuai dengan minat mereka. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru seperti polarisasi opini, manipulasi informasi, serta penyebaran berita palsu yang dapat mempengaruhi proses demokrasi secara negatif. Teknologi *blockchain* menjadi inovasi lain yang berpotensi meningkatkan transparansi dalam demokrasi digital. *Blockchain* dapat digunakan dalam sistem pemilu elektronik untuk memastikan keamanan

suara, mencegah kecurangan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

Beberapa negara telah mulai menguji coba sistem pemilu berbasis *blockchain* guna memastikan integritas data dan mempercepat proses penghitungan suara. Perkembangan demokrasi digital juga terlihat dalam penerapan pemerintahan elektronik atau *e-government*. Banyak negara telah mengadopsi platform digital untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, mengurangi birokrasi, serta memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan secara langsung melalui *platform* daring. Digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan memperkuat prinsip demokrasi dengan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan aspirasi publik secara lebih akurat.

3. Tantangan dalam Implementasi Demokrasi Digital

Meskipun demokrasi digital menawarkan berbagai keuntungan, penerapannya juga menghadapi tantangan yang signifikan. Keamanan siber menjadi salah satu isu utama dalam demokrasi digital, terutama dalam konteks pemilu daring dan perlindungan data pribadi. Serangan siber yang menargetkan sistem pemilu dapat merusak kredibilitas proses demokrasi serta menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Selain itu, kesenjangan digital masih menjadi hambatan dalam penerapan demokrasi digital yang inklusif. Tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet, sehingga terdapat risiko ketimpangan partisipasi politik. Faktor ekonomi, infrastruktur, dan tingkat literasi digital berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Regulasi yang tepat juga diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi digital tetap berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Undang-undang terkait privasi data, kebebasan berekspresi, serta pengelolaan *platform* digital harus dikembangkan guna menjaga keseimbangan antara kebebasan informasi dan perlindungan

terhadap penyalahgunaan teknologi dalam ranah politik. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem demokrasi digital yang sehat dan berkelanjutan (Arianto, 2023).

C. Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Era Digital

1. Transparansi dalam Demokrasi Digital

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi digital yang memungkinkan akses terbuka terhadap informasi publik. Dalam konteks digital, transparansi didukung oleh teknologi yang memungkinkan publik untuk memperoleh data secara *real-time* dan melakukan verifikasi terhadap keputusan politik serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Teknologi *blockchain* menjadi salah satu inovasi yang memperkuat transparansi dengan menciptakan sistem pencatatan yang tidak dapat diubah dan dapat diaudit secara publik. Menurut Chadwick (2013), digitalisasi dalam demokrasi memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan menciptakan lingkungan politik yang lebih akuntabel.

2. Partisipasi Publik yang Inklusif

Demokrasi dalam era digital mengedepankan partisipasi publik yang inklusif dengan memanfaatkan *platform* daring yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Media sosial, forum daring, dan petisi elektronik menjadi alat utama yang mendorong keterlibatan warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Konektivitas digital yang semakin meningkat memungkinkan keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi untuk memberikan pendapat dan berkontribusi dalam diskusi publik. Dahlberg (2011) menekankan bahwa teknologi digital dapat memperluas ruang deliberasi politik, meningkatkan akses terhadap informasi, serta mendukung proses demokrasi yang lebih inklusif.

2. Kebebasan Berpendapat dan Ekspresi

Era digital memberikan ruang yang lebih luas bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan elemen utama dalam demokrasi. Platform digital memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat secara bebas, baik melalui media sosial, blog, maupun diskusi daring. Namun, tantangan juga muncul dalam bentuk penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian yang dapat merusak kualitas diskursus demokratis. Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap dihormati tanpa mengorbankan stabilitas sosial dan keamanan informasi.

3. Akuntabilitas Pemerintah dan Institusi Publik

Prinsip akuntabilitas semakin diperkuat dengan adanya teknologi digital yang memungkinkan publik untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban dari pemegang kekuasaan. Penggunaan *platform* daring untuk pengawasan publik, seperti situs pemantauan kebijakan dan keterbukaan anggaran, menjadi alat penting dalam memastikan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Teknologi digital juga memungkinkan pemantauan kinerja pejabat publik secara lebih efektif melalui analisis data dan mekanisme umpan balik yang lebih cepat.

4. Keamanan dan Privasi dalam Demokrasi Digital

Keamanan dan privasi menjadi faktor krusial dalam penerapan demokrasi digital. Perlindungan terhadap data pribadi dan informasi sensitif harus dijamin agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan siber menjadi tantangan utama dalam menjaga integritas sistem demokrasi digital, terutama dalam pemilihan elektronik dan pengelolaan data pemilih. Implementasi enkripsi data, otentikasi berlapis, serta regulasi ketat mengenai perlindungan privasi menjadi langkah penting dalam memastikan keamanan sistem digital yang digunakan dalam proses demokrasi.

5. Literasi Digital sebagai Pilar Demokrasi

Pemahaman yang baik mengenai teknologi dan informasi digital menjadi elemen penting dalam demokrasi digital. Literasi digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses, memahami, serta mengevaluasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Kurangnya literasi digital dapat meningkatkan risiko manipulasi informasi dan penyebaran hoaks yang dapat mengganggu proses demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan mengenai literasi digital perlu diperkuat untuk membangun masyarakat yang lebih kritis dan mampu berpartisipasi secara efektif dalam demokrasi digital.

D. Peran Teknologi dalam Transformasi Demokrasi

1. Digitalisasi dalam Proses Pemilu

Pemanfaatan teknologi dalam pemilu telah memberikan perubahan signifikan terhadap transparansi, efisiensi, dan partisipasi politik. Sistem pemungutan suara elektronik dan penggunaan teknologi *blockchain* dalam pencatatan suara menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Teknologi ini memungkinkan pencatatan yang aman, sulit dimanipulasi, serta dapat diaudit oleh pihak berkepentingan. Dengan begitu, digitalisasi dalam proses pemilu mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan memperkuat akuntabilitas hasil pemilihan.

2. Partisipasi Politik melalui Platform Digital

Kemajuan teknologi digital telah membuka peluang besar bagi keterlibatan publik dalam proses demokrasi. Media sosial, petisi daring, dan forum diskusi berbasis internet memungkinkan publik untuk menyampaikan aspirasi secara lebih cepat dan luas. Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam analisis sentimen politik membantu dalam memahami opini publik dan merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Chadwick (2013), platform digital telah mengubah interaksi antara pemilih dan pemimpin politik dengan menciptakan ruang diskusi yang lebih dinamis dan demokratis.

3. Keterbukaan Informasi dan Transparansi Pemerintah

Teknologi memainkan peran penting dalam memastikan keterbukaan informasi dan transparansi dalam pemerintahan. Portal keterbukaan data dan sistem informasi publik berbasis daring memberikan akses luas terhadap kebijakan, anggaran, dan laporan kinerja pemerintah. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi jalannya pemerintahan dan menuntut akuntabilitas dari para pemangku kebijakan. Pemanfaatan teknologi dalam transparansi pemerintah menjadi kunci dalam membangun demokrasi yang lebih kuat dan berbasis kepercayaan publik.

4. Keamanan dan Privasi dalam Demokrasi Digital

Seiring dengan meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi dalam demokrasi, tantangan dalam keamanan siber dan perlindungan data pribadi juga semakin besar. Serangan siber terhadap infrastruktur demokrasi, seperti sistem pemilu dan basis data pemilih, menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas politik. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi keamanan siber, enkripsi data, dan perlindungan privasi sangat diperlukan untuk menjaga integritas proses demokrasi digital. Upaya dalam memperkuat keamanan informasi menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan keberlanjutan demokrasi yang berbasis teknologi.

5. Literasi Digital dan Kesetaraan Akses

Teknologi hanya dapat berfungsi secara optimal dalam demokrasi jika masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang memadai. Akses terhadap informasi yang akurat serta kemampuan untuk memilah sumber berita yang kredibel menjadi faktor penting dalam menghindari manipulasi informasi dan penyebaran disinformasi. Selain itu, kesenjangan digital juga menjadi tantangan yang perlu diatasi agar setiap individu dapat berpartisipasi secara setara dalam demokrasi digital. Program edukasi digital dan infrastruktur teknologi yang merata menjadi elemen penting dalam menciptakan

lingkungan demokrasi yang inklusif dan berbasis keadilan sosial.

E. **Demokrasi Digital versus Demokrasi Konvensional**

Demokrasi konvensional adalah bentuk pemerintahan sehingga keputusan politik diambil berdasarkan representasi yang dilakukan oleh wakil rakyat, yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu. Sistem ini telah berkembang selama beberapa abad, dengan fokus utama pada mekanisme perwakilan yang berlangsung di ruang publik fisik, seperti parlemen atau dewan legislatif. Pada sistem ini, peran warga negara dalam pengambilan keputusan politik lebih terbatas pada momen pemilihan umum yang dilakukan secara periodik. Sistem ini bertujuan untuk menjamin partisipasi publik, meskipun terbatas pada waktu-waktu tertentu, dan mengharuskan proses debat serta pembuatan keputusan dalam forum yang dikendalikan oleh wakil-wakil terpilih.

Sementara itu, demokrasi digital muncul sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memungkinkan interaksi politik dan partisipasi publik dilakukan secara langsung melalui *platform* digital. Demokrasi ini memungkinkan warga untuk mengakses informasi secara lebih cepat dan berpartisipasi dalam diskusi serta pengambilan keputusan melalui kanal-kanal digital, seperti media sosial, *e-petisi*, dan *platform* diskusi *online*. Demokrasi digital memperkenalkan konsep "partisipasi langsung" di luar proses pemilu, sehingga masyarakat dapat lebih aktif dalam memberikan pendapat, berbagi informasi, dan memengaruhi kebijakan tanpa terbatas oleh waktu dan tempat.

Perbedaan mendasar antara demokrasi konvensional dan demokrasi digital terletak pada cara partisipasi dilaksanakan. Demokrasi konvensional cenderung mengandalkan perwakilan dan proses formal di lembaga-lembaga pemerintah yang terstruktur, sedangkan demokrasi digital menawarkan bentuk partisipasi yang lebih terbuka dan spontan melalui internet. Demokrasi digital memungkinkan proses partisipasi yang lebih

inklusif, sehingga suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan dapat lebih terdengar melalui teknologi, sementara demokrasi konvensional sering kali memerlukan prosedur yang lebih formal dan terkadang membatasi akses kepada kelompok-kelompok tertentu (Castells, 2013).

Namun, meskipun demokrasi digital menawarkan potensi besar untuk memperluas partisipasi politik, terdapat pula tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah ketimpangan digital yang menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap teknologi. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur digital yang terbatas atau yang tidak memiliki akses ke teknologi informasi tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam demokrasi digital. Selain itu, masalah misinformasi dan disinformasi juga menjadi tantangan besar, karena media sosial dan *platform* digital memungkinkan informasi yang salah atau menyesatkan untuk menyebar dengan cepat, yang dapat mengganggu proses demokratis dan pengambilan keputusan yang berbasis informasi yang akurat (Howard & Hussain, 2013).

F. Model-Model Demokrasi Digital di Berbagai Negara

Demokrasi digital merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat partisipasi politik, transparansi pemerintahan, serta keterlibatan publik dalam proses pembuatan keputusan. Berbagai negara telah mengadopsi model demokrasi digital yang berbeda, yang disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi mereka. Model-model ini menunjukkan variasi dalam cara teknologi digunakan untuk memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Di Estonia, negara yang dianggap sebagai pelopor demokrasi digital, model yang diterapkan lebih terfokus pada *e-government* dan *e-participation*. Estonia mengintegrasikan teknologi digital dalam hampir semua aspek kehidupan publik, mulai dari pemilihan umum hingga administrasi publik. Salah satu inovasi utama yang diperkenalkan oleh Estonia adalah *e-residency*, yang memungkinkan individu di seluruh dunia untuk mengakses

layanan pemerintah secara digital. Pemilihan umum juga dilaksanakan secara daring, yang memungkinkan warga negara untuk memilih menggunakan sistem elektronik yang aman, memberikan kemudahan dan akses lebih besar bagi masyarakat yang berada di luar negeri atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. Model ini menunjukkan bagaimana demokrasi digital dapat mengurangi hambatan geografis dan meningkatkan aksesibilitas dalam sistem pemilu.

Di sisi lain, negara-negara dengan latar belakang yang lebih beragam dalam hal akses dan infrastruktur digital, seperti India, telah mengadopsi model demokrasi digital yang berfokus pada pengembangan aplikasi berbasis teknologi untuk memperluas akses dan partisipasi publik dalam pemerintahan. India meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan partisipasi warga negara melalui *platform* digital, seperti aplikasi *e-governance* yang memungkinkan penduduk untuk mengakses informasi mengenai kebijakan pemerintah, program kesejahteraan sosial, dan layanan administrasi publik. Sistem seperti ini memberi kesempatan kepada warga negara, terutama yang tinggal di daerah terpencil, untuk berinteraksi dengan pemerintah tanpa harus berkunjung langsung ke kantor pemerintah. Namun, meskipun ada perkembangan ini, ketimpangan digital masih menjadi masalah besar, mengingat masih adanya kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta perbedaan tingkat literasi digital (Bertot et al., 2010).

Model demokrasi digital di Finlandia, di sisi lain, lebih menekankan pada prinsip keterbukaan informasi dan partisipasi langsung melalui *platform* digital. Finlandia memiliki kebijakan terbuka dalam hal data publik, memungkinkan warganya untuk mengakses informasi kebijakan, anggaran, dan proyek pemerintah melalui *platform* digital yang transparan. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi warga negara untuk tidak hanya terinformasi tetapi juga untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan publik. Selain itu, Finlandia juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi politik melalui platform yang memungkinkan dialog langsung antara warga negara dan

pembuat kebijakan. Demokrasi digital di Finlandia berfokus pada integrasi antara partisipasi langsung dengan struktur pemerintahan yang ada, memastikan bahwa suara warga negara dapat tersampaikan dalam proses pembuatan keputusan yang lebih efektif.

Dalam konteks yang berbeda, model demokrasi digital di Tiongkok lebih terfokus pada pengawasan sosial dan kontrol pemerintah melalui teknologi. Pemerintah Tiongkok telah mengembangkan sistem yang disebut sebagai "social credit system," yang mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti perilaku online, aktivitas ekonomi, dan interaksi sosial, untuk menilai kepatuhan warga negara terhadap hukum dan aturan sosial. Walaupun ini bukan model demokrasi digital dalam pengertian tradisional, penggunaan teknologi untuk memonitor dan mengarahkan perilaku publik memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengontrol masyarakat. Sistem ini, meskipun kontroversial, mencerminkan pengaplikasian teknologi untuk meningkatkan disiplin sosial dan partisipasi politik yang sangat terstruktur, namun dengan batasan yang ketat dalam hal kebebasan berekspresi.

BAB 2

TEKNOLOGI DAN INFRASTRUKTUR DALAM DEMOKRASI DIGITAL

A. Pendahuluan

Teknologi dan infrastruktur dalam demokrasi digital merujuk pada berbagai sistem, perangkat, dan jaringan yang mendukung pelaksanaan proses demokratis secara elektronik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan penyelenggaraan pemilu yang lebih efisien, partisipasi publik yang lebih luas, serta transparansi yang lebih tinggi dalam pemerintahan. Infrastruktur digital yang kuat menjadi fondasi utama dalam mendukung sistem politik berbasis teknologi, memastikan aksesibilitas yang adil, serta menjamin keamanan data dan informasi yang beredar dalam ruang demokrasi digital. Pemahaman terhadap teknologi dan infrastruktur dalam demokrasi digital menjadi penting karena digitalisasi telah mengubah cara individu berinteraksi dengan pemerintahan serta berpartisipasi dalam proses politik. Sistem *e-voting*, menawarkan efisiensi dalam pemungutan suara serta mempercepat proses perhitungan hasil pemilu. *Platform* partisipasi daring memungkinkan publik untuk memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, sementara sistem keterbukaan data memungkinkan pengawasan lebih efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Teknologi juga memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat, membantu publik dalam memahami isu-isu politik, serta meningkatkan keterlibatan dalam diskusi kebijakan.

Keamanan menjadi aspek krusial dalam pengembangan infrastruktur demokrasi digital. Serangan siber, peretasan sistem pemilu, serta penyebaran disinformasi dapat mengancam legitimasi proses demokratis. Oleh karena itu, penerapan teknologi enkripsi, sistem autentikasi yang kuat, serta perlindungan data pribadi menjadi bagian dari strategi untuk memastikan integritas demokrasi digital. Selain itu, penggunaan teknologi *blockchain* dalam pemilu menawarkan transparansi yang lebih tinggi serta mengurangi potensi manipulasi data, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Kesenjangan digital menjadi tantangan lain dalam penerapan teknologi demokrasi digital. Perbedaan akses terhadap perangkat teknologi, infrastruktur internet, serta tingkat literasi digital dapat menciptakan ketimpangan dalam partisipasi politik. Masyarakat di wilayah dengan konektivitas rendah atau sumber daya teknologi terbatas berisiko mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi politik dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengatasi tantangan ini, pembangunan infrastruktur digital yang merata serta peningkatan literasi teknologi menjadi langkah strategis dalam mewujudkan demokrasi digital yang inklusif.

Adopsi teknologi dalam demokrasi digital terus berkembang seiring dengan inovasi dalam bidang kecerdasan buatan, analitik data, serta *internet of things* (IoT). Sistem berbasis kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam opini publik, membantu dalam perumusan kebijakan berbasis data, serta meningkatkan efisiensi layanan publik. *Platform* digital yang dirancang dengan prinsip keterbukaan dan keamanan yang kuat dapat memperkuat demokrasi dengan memberikan akses yang lebih luas kepada publik serta mengurangi celah bagi manipulasi politik. Oleh karena itu, pengembangan teknologi dan infrastruktur dalam demokrasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung, tetapi juga sebagai elemen fundamental dalam memastikan partisipasi politik yang transparan, aman, dan inklusif.

B. Sistem Elektronik untuk Pemilu dan Partisipasi Publik

Sistem elektronik untuk pemilu telah berkembang sebagai salah satu bentuk inovasi dalam demokrasi modern, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pemilihan umum. Implementasi sistem elektronik dalam pemilu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi pemilih. Teknologi ini memungkinkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu dari jarak jauh, mengurangi potensi kecurangan, serta meningkatkan akurasi hasil pemilihan dengan menggunakan perangkat digital yang terintegrasi. Di negara-negara yang mengadopsi sistem ini, penggunaan teknologi mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mempercepat proses pemilu.

Estonia adalah contoh negara yang berhasil menerapkan sistem pemilu elektronik, dengan sistem *e-voting* yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005. Pemilih di Estonia dapat memberikan suara melalui internet menggunakan tanda tangan digital yang aman, yang memungkinkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu dari mana saja. Sistem ini juga memberikan kemudahan bagi pemilih di luar negeri, memperluas partisipasi publik yang lebih inklusif. Dengan adanya sistem *e-voting* ini, Estonia telah berhasil menciptakan lingkungan yang transparan dan dapat diakses oleh lebih banyak orang, termasuk pemilih yang memiliki keterbatasan mobilitas atau berada di luar negeri. Keamanan dalam proses *e-voting* di Estonia dijaga melalui penggunaan teknologi enkripsi canggih, yang memastikan kerahasiaan dan integritas suara yang diberikan oleh pemilih.

Namun, meskipun sistem *e-voting* memiliki banyak keuntungan, tantangan terkait dengan keamanan dan potensi penyalahgunaan teknologi tetap ada. Beberapa negara yang mencoba mengadopsi sistem serupa, seperti Amerika Serikat, mengalami kesulitan terkait dengan kerentanannya terhadap serangan siber, yang dapat merusak integritas pemilu. Masalah terkait dengan keamanan data dan perlindungan privasi pemilih

menjadi perhatian utama dalam implementasi sistem elektronik ini. Oleh karena itu, setiap negara yang berencana untuk menerapkan sistem elektronik dalam pemilu perlu memastikan bahwa infrastruktur digital yang digunakan telah diuji dengan baik untuk menghindari potensi ancaman terhadap keamanan (Bertot et al., 2010).

Selain itu, sistem elektronik tidak hanya digunakan dalam pemilu, tetapi juga dalam memperluas partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Di berbagai negara, teknologi juga digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah penggunaan *platform* digital untuk memfasilitasi *e-participation*, yang memungkinkan warga negara untuk mengusulkan kebijakan, memberikan opini, atau berpartisipasi dalam survei publik yang digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan. *Platform* ini memberikan ruang bagi warga negara untuk terlibat secara langsung dalam proses pemerintahan, memperkuat peran publik dalam pengambilan keputusan. Di negara-negara seperti Finlandia, pemerintah telah mengembangkan *platform e-democracy* yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam konsultasi kebijakan secara langsung melalui internet. Penggunaan *platform* ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperkuat partisipasi demokratis di tingkat lokal maupun nasional.

Namun, adopsi sistem elektronik dalam pemilu dan partisipasi publik juga menimbulkan tantangan terkait dengan aksesibilitas. Kesenjangan digital masih menjadi masalah utama di banyak negara, sehingga sebagian populasi, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang, tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi atau internet. Dalam hal ini, meskipun sistem elektronik dapat meningkatkan partisipasi publik di beberapa kalangan, namun ketimpangan digital dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam representasi dan partisipasi politik (Bertot et al., 2010). Untuk itu, penting bagi negara-negara yang ingin mengimplementasikan sistem elektronik untuk memastikan bahwa infrastruktur digital dan literasi digital tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat.

C. Peran *Big Data* dan *Artificial Intelligence* dalam Demokrasi Digital

Big data dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah menjadi dua pilar utama dalam perkembangan demokrasi digital, menyediakan alat yang kuat untuk menganalisis, memahami, dan mengelola partisipasi publik serta pengambilan keputusan politik. Dalam konteks demokrasi digital, kedua teknologi ini berperan dalam memfasilitasi akses informasi, meningkatkan transparansi, serta memperkaya proses pembuatan kebijakan dengan data yang lebih mendalam dan analisis yang lebih akurat. *Big data* mengacu pada volume besar data yang dihasilkan oleh interaksi digital, sementara *artificial intelligence* digunakan untuk memproses, menganalisis, dan memberikan wawasan dari data tersebut.

Big data memainkan peran penting dalam memahami pola perilaku dan preferensi politik masyarakat. Data yang terkumpul dari berbagai sumber seperti media sosial, *platform e-governance*, dan interaksi digital lainnya memungkinkan pemerintah dan lembaga demokrasi untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai opini publik. Penggunaan *big data* dalam pemilu, memungkinkan analisis perilaku pemilih dan peramalan hasil pemilu berdasarkan data yang dikumpulkan selama kampanye. Data ini juga digunakan untuk menilai isu-isu yang paling relevan bagi masyarakat, memberikan gambaran tentang kebutuhan dan keinginan pemilih yang lebih baik. Di negara-negara yang mengadopsi *big data* dalam sistem demokrasi digital, kebijakan publik dapat dirumuskan dengan lebih akurat dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013).

Namun, pengumpulan dan analisis *big data* tidak lepas dari tantangan terkait privasi dan keamanan. Dalam banyak kasus, data pribadi yang terkumpul melalui berbagai saluran digital dapat disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik. Isu terkait perlindungan data pribadi menjadi sangat penting ketika data digunakan untuk analisis perilaku politik atau untuk menargetkan pemilih dalam kampanye. Oleh karena itu, penting bagi negara-

negara yang menggunakan *big data* dalam demokrasi digital untuk memastikan bahwa ada kebijakan yang jelas terkait dengan perlindungan data pribadi dan keamanan siber, serta untuk menjaga agar analisis data tetap transparan dan adil.

Artificial Intelligence juga berperan penting dalam mengolah dan menganalisis *big data*. Kecerdasan buatan memungkinkan proses otomatisasi dalam mengidentifikasi pola dan tren dalam data besar, serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis tersebut. Dalam demokrasi digital, *Artificial Intelligence* digunakan untuk mempersonalisasi pengalaman politik bagi individu, misalnya melalui rekomendasi berita atau konten politik yang relevan, serta untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai topik-topik yang menjadi perhatian publik. Selain itu, *artificial intelligence* juga digunakan dalam sistem pemilihan untuk memverifikasi identitas pemilih, memastikan integritas pemilu, dan mengidentifikasi potensi kecurangan atau manipulasi data.

Penggunaan *artificial intelligence* dalam demokrasi digital, meskipun menawarkan banyak manfaat, juga menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi dan akuntabilitas algoritma. Salah satu tantangan terbesar dalam penggunaan *artificial intelligence* adalah ketidakjelasan mengenai bagaimana algoritma dibuat dan diimplementasikan. Algoritma yang tidak transparan dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam partisipasi politik dengan memperkuat bias yang ada dalam data atau dengan mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, untuk menjaga demokrasi yang adil dan inklusif, sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan teknologi *artificial intelligence* dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas (O'Neil, 2016).

D. Keamanan Siber dalam Proses Demokrasi Digital

Keamanan siber memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi digital. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek demokrasi, mulai dari pemilu hingga partisipasi publik, ancaman terhadap

keamanan siber semakin menjadi isu yang signifikan. Demokrasi digital yang memanfaatkan *platform online* untuk interaksi politik, kampanye pemilu, atau pengambilan keputusan politik rentan terhadap berbagai jenis ancaman siber, seperti serangan peretasan, manipulasi data, atau penyebaran informasi palsu. Oleh karena itu, perlindungan terhadap sistem digital yang mendukung demokrasi sangatlah penting untuk mencegah kerusakan pada proses demokratis itu sendiri.

Salah satu tantangan utama dalam keamanan siber untuk demokrasi digital adalah potensi peretasan terhadap sistem pemilu elektronik. Pemilu berbasis teknologi, seperti *e-voting* atau penghitungan suara elektronik, memberikan peluang bagi peretas untuk mengakses data sensitif atau bahkan memanipulasi hasil pemilu. Serangan semacam ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilihan dan merusak legitimasi hasil pemilu. Contohnya, dalam beberapa kasus, serangan siber terhadap sistem pemilu di negara-negara tertentu menunjukkan betapa rentannya sistem ini terhadap ancaman luar. Di beberapa negara, serangan terhadap sistem *e-voting* telah menyebabkan penundaan pemilu atau kebingungan publik terkait hasil pemilihan. Oleh karena itu, pengembangan sistem *e-voting* yang aman dan transparan, yang dapat menjaga kerahasiaan suara pemilih dan mencegah manipulasi, menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kepercayaan terhadap proses demokrasi digital (Arianto & Rani, 2024).

Selain itu, keamanan siber juga berperan dalam melindungi data pribadi pemilih dan warga negara yang berpartisipasi dalam *platform* demokrasi digital. Dalam era digital, data pribadi menjadi komoditas yang sangat berharga dan rentan untuk disalahgunakan. Dalam konteks demokrasi digital, data pemilih sering kali dikumpulkan untuk tujuan analisis perilaku atau untuk menyusun strategi kampanye. Namun, jika data tersebut jatuh ke tangan yang salah, dapat terjadi pelanggaran privasi yang merugikan individu dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, pengamanan data pribadi melalui enkripsi yang kuat, serta regulasi yang jelas tentang hak

privasi individu, sangat penting untuk memastikan bahwa informasi sensitif tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Solove, 2021).

Selain itu, ancaman terhadap keamanan siber juga mencakup penyebaran informasi palsu atau disinformasi melalui *platform* digital. *Platform* media sosial, yang sering kali digunakan untuk kampanye politik dan debat publik, juga dapat menjadi sarana untuk menyebarkan konten yang menyesatkan atau memanipulasi opini publik. Serangan semacam ini dapat mengganggu proses demokratis dengan mengaburkan fakta dan membentuk opini publik yang tidak berdasar. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sistem yang mampu mendeteksi dan menangani informasi palsu, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bagaimana mengenali dan menghindari berita palsu dalam konteks pemilu atau isu politik lainnya. Penggunaan algoritma untuk memerangi disinformasi, serta kolaborasi antara *platform* digital dan pemerintah, menjadi bagian dari upaya untuk menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat dan berbasis informasi yang benar.

E. Blockchain dan Transparansi dalam Pemilu Digital

Teknologi *blockchain*, yang awalnya dikenal sebagai dasar dari *cryptocurrency* seperti Bitcoin, kini mulai diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk dalam pemilu digital, sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan. *Blockchain* merupakan sistem pencatatan transaksi yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah setelah data tercatat, yang menjadikannya sangat aman dari manipulasi. Dalam konteks pemilu digital, penerapan *blockchain* berpotensi untuk memastikan integritas pemilihan dengan memberikan catatan yang transparan dan dapat diaudit terhadap setiap suara yang diberikan, sehingga meminimalisir potensi kecurangan atau manipulasi hasil pemilu.

Salah satu aspek utama dari *blockchain* dalam pemilu digital adalah kemampuannya untuk menciptakan jejak audit yang tidak dapat diubah. Setiap suara yang diberikan melalui sistem pemilu berbasis *blockchain* dicatat dalam blok yang terhubung satu sama

lain dalam suatu rantai, sehingga membentuk rekaman permanen yang dapat diakses dan diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Keunggulan ini membuat *blockchain* sangat berguna dalam konteks pemilu, karena memungkinkan setiap pihak, baik pemilih, pengawas pemilu, maupun pihak terkait lainnya, untuk memverifikasi hasil pemilu dengan mudah dan tanpa keraguan. Sistem ini juga memastikan bahwa suara pemilih tidak dapat diubah atau dihapus setelah dicatat, mengurangi risiko manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Narayanan et al., 2016).

Selain itu, *blockchain* dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemilu digital dengan memberikan rasa aman dan percaya bahwa hasil pemilu yang dihasilkan adalah akurat dan bebas dari intervensi pihak luar. Dalam pemilu digital tradisional, kepercayaan terhadap sistem dapat tergerus jika pemilih atau pengamat meragukan integritas proses penghitungan suara. Namun, dengan menggunakan *blockchain*, pemilih dapat melihat secara langsung dan dalam waktu nyata bagaimana suara mereka tercatat dan diproses, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi sistem pemilu secara keseluruhan. Selain itu, keterbukaan ini juga dapat mempercepat proses penghitungan suara, karena semua transaksi suara tercatat secara otomatis dalam jaringan terdesentralisasi tanpa memerlukan pengolahan manual yang rentan terhadap kesalahan atau kecurangan.

Penerapan *blockchain* dalam pemilu digital juga memiliki potensi untuk mengurangi biaya yang terkait dengan proses pemilihan, seperti biaya penghitungan suara, pengamanan data, dan pengawasan pemilu. Sistem berbasis *blockchain* menghilangkan kebutuhan untuk pihak ketiga yang mengelola dan memverifikasi suara, yang dapat mengurangi kerumitan administrasi dan meningkatkan efisiensi. Di beberapa negara, eksperimen dengan sistem pemilu berbasis *blockchain* telah menunjukkan bahwa teknologi ini tidak hanya memperbaiki aspek keamanan dan transparansi, tetapi juga mempermudah proses pemilihan, baik dari sisi teknis maupun biaya operasional.

Namun, meskipun *blockchain* menawarkan berbagai keuntungan, tantangan masih ada dalam implementasinya, terutama terkait dengan skalabilitas dan adopsi teknologi ini secara luas. Untuk sistem *blockchain* berfungsi efektif dalam pemilu digital, diperlukan infrastruktur yang cukup kuat untuk menangani volume besar transaksi suara yang tercatat dalam jaringan. Selain itu, pengembangan sistem *blockchain* yang *user-friendly*, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam, juga menjadi tantangan penting. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara yang berencana mengadopsi teknologi ini untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut guna memastikan penerimaan dan efektivitas *blockchain* dalam konteks pemilu digital.

F. Infrastruktur Digital dan Kesenjangan Teknologi

Infrastruktur digital yang kuat merupakan elemen kunci dalam mendukung perkembangan demokrasi digital dan pemilu berbasis teknologi. Infrastruktur ini mencakup berbagai komponen, seperti jaringan internet yang cepat dan aman, pusat data, perangkat keras dan perangkat lunak, serta akses kepada *platform* digital yang memungkinkan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Infrastruktur yang memadai memungkinkan terciptanya sistem yang transparan, aman, dan efisien dalam pelaksanaan pemilu atau pengambilan keputusan politik secara digital. Namun, ketimpangan dalam distribusi infrastruktur digital dapat menyebabkan kesenjangan teknologi, yang berpotensi menghambat akses sejumlah kelompok masyarakat terhadap manfaat demokrasi digital.

Salah satu tantangan utama terkait infrastruktur digital adalah ketimpangan dalam akses ke teknologi yang mendalam di antara berbagai lapisan masyarakat, baik dalam konteks geografis maupun sosial-ekonomi. Di banyak negara berkembang, masih ada daerah yang tidak terjangkau oleh koneksi internet yang memadai, yang menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi digital. Hal ini juga berlaku dalam pemilu digital,

sehingga warga negara yang tidak memiliki akses ke perangkat atau koneksi internet yang stabil tidak dapat berpartisipasi dengan cara yang sama seperti warga negara lainnya. Infrastruktur digital yang terbatas ini berkontribusi pada terjadinya ketimpangan dalam akses informasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas partisipasi publik dan pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi digital.

Selain itu, kesenjangan teknologi tidak hanya terjadi karena akses terbatas terhadap infrastruktur digital, tetapi juga karena perbedaan dalam keterampilan digital di antara berbagai kelompok masyarakat. Pengguna teknologi membutuhkan pemahaman yang cukup tentang cara menggunakan perangkat dan platform digital dengan aman dan efektif. Kesenjangan keterampilan ini terutama terlihat di kalangan kelompok yang lebih tua, masyarakat pedesaan, dan mereka yang berasal dari latar belakang pendidikan yang lebih rendah. Dalam konteks demokrasi digital, ketidakmampuan untuk menggunakan teknologi dengan efektif dapat mengurangi partisipasi aktif dalam diskusi politik, kampanye, atau bahkan pemilu berbasis teknologi. Hal ini menciptakan lapisan ketidaksetaraan tambahan, sehingga sebagian besar masyarakat menjadi terpinggirkan dalam proses demokrasi yang semestinya inklusif.

Kesenjangan ini semakin nyata dalam negara-negara dengan disparitas ekonomi yang besar. Di beberapa negara, meskipun ada perkembangan pesat dalam teknologi dan infrastruktur digital di kota-kota besar, wilayah pedesaan atau daerah terpencil sering kali tertinggal. Ketimpangan ini berhubungan langsung dengan ketidakmerataan akses terhadap internet berkecepatan tinggi, perangkat elektronik, dan pelatihan keterampilan digital yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi digital. Sebagai contoh, di beberapa daerah yang kurang berkembang, meskipun *platform* untuk pemilu digital atau partisipasi politik online telah tersedia, hambatan fisik seperti kurangnya akses listrik atau internet yang tidak stabil menghalangi akses warga terhadap platform tersebut. Keadaan ini

berisiko memperburuk ketidaksetaraan dalam partisipasi politik dan keputusan yang diambil.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun infrastruktur digital dan teknologi dapat menawarkan peluang besar untuk memperkuat demokrasi digital, ketidakmerataan dalam distribusi akses dan keterampilan dapat memperburuk kesenjangan sosial dan politik. Oleh karena itu, negara-negara yang beralih menuju sistem demokrasi digital perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak hanya terfokus pada area yang lebih berkembang, tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan akses dan keterampilan di seluruh masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan yang mendukung pemerataan distribusi teknologi dan pendidikan digital sangat penting untuk mengurangi kesenjangan teknologi dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi yang semakin bergantung pada teknologi (Helsper, 2021).

G. Regulasi Teknologi dalam Demokrasi Digital

Regulasi teknologi memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan keadilan sistem demokrasi digital. Proses digitalisasi dalam ranah politik, termasuk dalam pemilu, partisipasi publik, dan pengambilan keputusan politik, menuntut pengaturan yang cermat terkait dengan penggunaan teknologi guna melindungi hak-hak individu serta memastikan integritas dan transparansi sistem tersebut. Di dunia yang semakin terhubung secara digital, penyusunan regulasi yang sesuai untuk mengelola dan mengawasi penggunaan teknologi dalam konteks demokrasi digital menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Regulasi yang efektif akan memastikan bahwa teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat keadilan sosial dan politik.

Salah satu aspek penting dari regulasi teknologi dalam demokrasi digital adalah perlindungan data pribadi dan privasi pengguna. Dalam sistem demokrasi digital, data individu –

termasuk data pemilih, informasi partisipasi politik, serta riwayat interaksi dengan *platform* politik—mendapatkan perhatian besar terkait dengan bagaimana data tersebut dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Regulasi yang memadai sangat diperlukan untuk melindungi data pribadi agar tidak jatuh ke tangan yang salah atau digunakan untuk kepentingan yang tidak sah. Selain itu, pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan teknologi oleh pihak tertentu yang dapat merusak proses demokrasi, seperti pengumpulan data secara ilegal atau penyebaran informasi yang salah. Oleh karena itu, negara-negara yang mengadopsi teknologi dalam sistem demokrasi digital harus menyusun undang-undang yang kuat terkait dengan perlindungan data pribadi dan hak privasi pengguna (Zohar, 2018).

Regulasi juga diperlukan untuk mengatur transparansi algoritma yang digunakan dalam sistem demokrasi digital. Banyak sistem yang mendukung pemilu atau proses politik berbasis teknologi menggunakan algoritma untuk memproses data atau mengarahkan informasi kepada publik. Sebagai contoh, pemberian rekomendasi atau analisis sentimen politik, harus berada di bawah pengawasan regulasi yang memastikan bahwa algoritma tersebut tidak memihak atau diskriminatif. Algoritma yang digunakan dalam pemilu digital atau kampanye politik berpotensi untuk mempengaruhi cara orang memilih atau berpartisipasi, tergantung pada bagaimana data disajikan kepada pemilih. Dalam hal ini, regulasi teknologi perlu mencakup pengawasan terhadap bagaimana algoritma beroperasi dan bagaimana keputusan politik dapat dipengaruhi oleh platform digital. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengeksploitasi ketidaktahuan atau ketidakberdayaan publik dalam berinteraksi dengan sistem yang berbasis teknologi (O'Neil, 2016).

Aspek lain dari regulasi teknologi dalam demokrasi digital adalah pengendalian terhadap penyebaran informasi palsu atau hoaks. Penyebaran informasi yang salah dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan keputusan

politik, serta mengganggu stabilitas sosial. Dalam hal ini, regulasi teknologi berfungsi untuk memastikan bahwa *platform* digital, seperti media sosial, memiliki mekanisme yang jelas untuk mengidentifikasi, menghapus, dan menghentikan penyebaran informasi yang salah. Beberapa negara telah mulai mengembangkan kebijakan yang menuntut *platform* media sosial untuk mengambil tindakan proaktif dalam menangani hoaks, termasuk bekerja sama dengan lembaga independen atau ahli untuk mengidentifikasi dan mengoreksi informasi yang menyesatkan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkecil dampak negatif dari penyebaran informasi palsu dalam demokrasi digital.

Keterbukaan dan akuntabilitas juga menjadi perhatian utama dalam regulasi teknologi. Penggunaan teknologi dalam pemilu atau pengambilan keputusan politik harus dilakukan dengan transparansi yang tinggi, sehingga publik dapat mengakses dan memverifikasi data serta algoritma yang digunakan. Regulasi yang mengatur teknologi dalam demokrasi digital harus mencakup kewajiban bagi *platform* digital dan penyelenggara pemilu untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai proses yang dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa teknologi tidak hanya mempermudah proses demokrasi, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas. Regulasi yang tepat akan memastikan bahwa teknologi dalam demokrasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat yang efisien dan efektif, tetapi juga sebagai instrumen yang aman, adil, dan transparan, mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang lebih besar. Mengingat dampak yang luas dari penggunaan teknologi dalam demokrasi digital, regulasi yang komprehensif dan terus berkembang diperlukan untuk menanggapi tantangan dan perubahan yang muncul dalam ekosistem digital.

BAB 3

PARTISIPASI PUBLIK DALAM DEMOKRASI DIGITAL

A. Pendahuluan

Partisipasi publik dalam demokrasi digital mengacu pada keterlibatan individu dalam proses politik yang difasilitasi oleh teknologi digital. Perkembangan internet dan perangkat komunikasi telah menciptakan ruang baru bagi keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, penyampaian aspirasi, serta pengawasan terhadap kebijakan publik. Dengan adanya teknologi digital, akses terhadap informasi politik menjadi lebih luas, memungkinkan setiap individu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang berkembang. Selain itu, keterlibatan dalam diskusi publik semakin mudah melalui berbagai *platform* digital, yang pada akhirnya memperkuat demokrasi secara keseluruhan.

Pemahaman mengenai partisipasi publik dalam demokrasi digital menjadi penting karena digitalisasi telah mengubah pola interaksi antara individu dengan pemerintahan. Akses terhadap media sosial, forum daring, serta *platform* petisi daring memberikan kesempatan bagi publik untuk menyuarakan pendapat serta mempengaruhi kebijakan. Berbagai mekanisme partisipatif, seperti konsultasi publik berbasis digital, jajak pendapat daring, serta inisiatif warga melalui *platform* kolaboratif, memungkinkan keterlibatan yang lebih luas dalam proses demokratis. Dengan demikian, demokrasi tidak lagi terbatas pada pemilihan umum atau keterlibatan dalam lembaga formal, tetapi juga meluas ke ruang digital yang dinamis dan interaktif.

Teknologi digital juga berperan dalam meningkatkan transparansi pemerintahan dan akuntabilitas pejabat publik. Keterbukaan data memungkinkan individu untuk mengakses informasi mengenai kebijakan yang diambil, alokasi anggaran, serta berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Melalui keterlibatan aktif dalam demokrasi digital, pengawasan terhadap kinerja pemerintah dapat dilakukan secara lebih efektif. Keberadaan media sosial dan platform berbasis teknologi memungkinkan diskusi terbuka mengenai kebijakan publik, yang dapat mempercepat respons dari pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

Tantangan dalam partisipasi publik dalam demokrasi digital mencakup kesenjangan digital, misinformasi, serta risiko manipulasi opini publik. Tidak semua individu memiliki akses yang setara terhadap teknologi digital, sehingga menciptakan ketimpangan dalam partisipasi politik. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan juga dapat menghambat proses demokrasi yang sehat, terutama ketika opini publik terbentuk berdasarkan narasi yang tidak berbasis fakta. Algoritma dalam media sosial yang dirancang untuk menampilkan konten berdasarkan preferensi individu berpotensi mempersempit wawasan terhadap isu-isu yang lebih luas (Arianto & Handayani, 2022).

Keamanan dalam partisipasi digital juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan, mengingat ancaman seperti pencurian data, peretasan, serta intimidasi daring dapat menghambat kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, literasi digital menjadi faktor penting dalam memastikan partisipasi yang efektif dan aman dalam demokrasi digital. Pemahaman yang baik mengenai cara menyaring informasi, menjaga privasi daring, serta memanfaatkan *platform* digital secara konstruktif akan meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam proses politik. Dengan adanya infrastruktur digital yang inklusif, kebijakan yang responsif, serta kesadaran publik yang tinggi terhadap hak dan tanggung jawab dalam ruang digital, demokrasi digital dapat

menjadi sarana yang lebih efektif dalam mewujudkan keterlibatan politik yang lebih luas dan bermakna.

B. Media Sosial sebagai Sarana Partisipasi Politik

Peran media sosial dalam politik telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menjadikannya sebagai salah satu saluran utama bagi individu untuk berpartisipasi dalam diskursus politik. Media sosial menawarkan platform di mana warga negara dapat menyuarakan pendapat, berpartisipasi dalam debat politik, serta mengakses informasi politik dengan cara yang lebih langsung dan real-time dibandingkan dengan media tradisional. Berbagai *platform* media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok telah memfasilitasi interaksi politik yang lebih terbuka dan partisipatif. Dalam konteks demokrasi digital, media sosial menjadi alat yang sangat berharga dalam memperluas partisipasi politik publik (Arianto & Handayani, 2023).

Salah satu karakteristik utama dari media sosial sebagai sarana partisipasi politik adalah kemampuannya untuk menghilangkan batasan tradisional dalam akses informasi. Di masa lalu, masyarakat harus bergantung pada media mainstream yang sering kali dikendalikan oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan informasi politik. Dengan hadirnya media sosial, siapa pun dapat menjadi produsen informasi dan ikut serta dalam percakapan politik. Pengguna media sosial dapat mengikuti perkembangan isu politik, bergabung dalam diskusi, menyebarkan opini, atau bahkan mengorganisir kampanye dan gerakan politik secara mandiri (Boulianne, 2015). Hal ini mengubah dinamika kekuasaan informasi dan memberi ruang yang lebih besar bagi keberagaman pandangan dalam proses politik. Informasi yang cepat dan mudah diakses melalui media sosial memungkinkan warga negara untuk menjadi lebih terinformasi dan berpartisipasi aktif dalam pemilu, kebijakan publik, dan tindakan kolektif lainnya.

Selain itu, media sosial juga memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan untuk

menyuarakan pendapat dan memperjuangkan isu-isu yang kurang mendapat perhatian dalam mainstream. Gerakan sosial seperti #BlackLivesMatter, #MeToo, atau gerakan lingkungan hidup sering kali dimulai atau diperkuat melalui penggunaan media sosial. *Platform* digital memungkinkan kelompok-kelompok ini untuk mengorganisir dukungan, memperluas jangkauan pesan, dan memobilisasi aksi politik dalam skala global. Aktivisme berbasis media sosial menjadi bentuk partisipasi yang sangat efektif dalam konteks demokrasi digital, karena memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat tanpa harus hadir secara fisik dalam pertemuan atau demonstrasi. Selain itu, media sosial sering kali digunakan untuk mengumpulkan tanda tangan untuk petisi online, menyebarkan pesan politik dalam bentuk video, atau merencanakan aksi massa dalam waktu singkat (Tufekci, 2014).

Salah satu contoh nyata dari pengaruh media sosial dalam partisipasi politik adalah dalam konteks pemilu. Banyak pemimpin politik dan partai-partai politik kini mengandalkan *platform* media sosial untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih. Melalui media sosial, calon pejabat dapat berbagi visi, menyampaikan kebijakan, dan berinteraksi dengan konstituen tanpa perlu melalui media tradisional yang sering kali lebih selektif. Media sosial juga memungkinkan kampanye untuk lebih terjangkau dan lebih murah, memberi peluang bagi kandidat dengan sumber daya terbatas untuk menjangkau pemilih yang lebih luas. Keberhasilan kampanye politik yang mengandalkan media sosial juga mencerminkan potensi besar dari media sosial sebagai sarana untuk memperluas partisipasi politik dan meningkatkan keterlibatan pemilih dalam proses demokrasi (Boulianne, 2015).

Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial dalam partisipasi politik juga membawa tantangan tersendiri. Salah satu isu utama adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Media sosial, meskipun sangat efektif dalam menyebarkan informasi, juga rentan terhadap penyebaran disinformasi yang dapat mempengaruhi persepsi publik dan mengarahkan perilaku politik secara salah. *Misleading news*, video yang dipotong secara

selektif, atau meme yang menyesatkan dapat merusak integritas proses demokrasi dan mengaburkan fakta. Oleh karena itu, meskipun media sosial membuka peluang baru untuk partisipasi politik, pengawasan terhadap konten yang beredar di platform ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang dikonsumsi oleh publik adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan (Tufekci, 2014).

Selain itu, algoritma yang digunakan oleh *platform* media sosial untuk menampilkan konten juga dapat memperkuat bias dan mempengaruhi partisipasi politik. Algoritma ini cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan minat dan pandangan politik pengguna, menciptakan "echo chambers" sehingga individu hanya terpapar pada informasi yang mendukung pandangan mereka sendiri. Hal ini dapat mengurangi keberagaman perspektif yang seharusnya ada dalam ruang publik dan memperburuk polarisasi politik. Regulator dan pembuat kebijakan menghadapi tantangan dalam merumuskan regulasi yang dapat mengatasi masalah ini sambil tetap melindungi kebebasan berekspresi di media sosial.

Secara keseluruhan, media sosial memainkan peran yang semakin penting dalam memungkinkan partisipasi politik yang lebih inklusif dan terbuka. Meskipun terdapat tantangan terkait dengan informasi yang salah dan fragmentasi sosial, potensi media sosial dalam memperluas keterlibatan politik dan mempercepat mobilisasi sosial tidak dapat dipandang sebelah mata. Kebijakan yang baik dan regulasi yang bijak diperlukan untuk memaksimalkan manfaat media sosial dalam demokrasi digital, sekaligus mengurangi potensi dampak negatifnya.

C. *E-Participation* dan Keterlibatan Warga Negara

E-participation merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk melibatkan warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks demokrasi digital, *e-participation* memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam proses politik dan sosial tanpa harus terikat oleh batasan geografis, waktu, atau media tradisional. *E-*

participation mencakup berbagai bentuk keterlibatan digital, mulai dari memberikan umpan balik tentang kebijakan publik, berpartisipasi dalam diskusi politik, hingga berkontribusi pada pembuatan keputusan melalui *platform* online yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah. *Platform e-participation* ini biasanya digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam proses pemerintahan.

Salah satu aspek penting dari *e-participation* adalah kemampuannya untuk meningkatkan inklusivitas dalam partisipasi politik. Sebelum era digital, keterlibatan warga negara dalam proses politik sering kali terbatas oleh akses terhadap media tradisional atau keterbatasan geografis. Dengan hadirnya internet dan berbagai *platform* digital, individu yang sebelumnya tidak memiliki akses yang sama terhadap proses politik kini dapat menyuarakan pendapatnya. *E-participation* memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintahan, mulai dari memberi suara dalam survei kebijakan, berpartisipasi dalam forum diskusi online, hingga ikut dalam pemilihan umum elektronik yang lebih modern. Selain itu, *e-participation* juga memfasilitasi partisipasi dalam pengawasan kebijakan, di mana warga negara dapat mengidentifikasi dan melaporkan ketidaksesuaian atau penyalahgunaan dalam kebijakan publik.

Namun, meskipun *e-participation* menawarkan potensi besar dalam meningkatkan keterlibatan warga negara, keberhasilan implementasi *e-participation* bergantung pada beberapa faktor penting, salah satunya adalah akses terhadap teknologi. Akses yang tidak merata terhadap infrastruktur digital, seperti internet yang cepat dan perangkat yang memadai, dapat menyebabkan kesenjangan dalam partisipasi politik. Di banyak negara, terutama di negara berkembang, sebagian besar populasi masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses teknologi informasi. Tanpa akses yang memadai, *e-participation* tidak dapat menciptakan inklusivitas yang diharapkan dan justru memperburuk kesenjangan partisipasi antara kelompok yang lebih terpelajar dan yang kurang terpelajar secara digital (Bertot et al.,

2010). Oleh karena itu, keberhasilan *e-participation* memerlukan upaya untuk mengatasi masalah infrastruktur digital, serta kebijakan yang memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis, dapat mengakses *platform e-participation*.

Di sisi lain, *e-participation* juga berpotensi memperkuat partisipasi politik melalui pemberdayaan individu. *Platform-platform* digital yang menawarkan ruang bagi diskusi, pertukaran ide, dan umpan balik memungkinkan warga negara untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan politik secara langsung. *E-participation* memberi warga negara suara dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta memberikan kesempatan untuk berbicara dan bertindak dalam masalah yang relevan. Sebagai contoh, banyak pemerintah daerah yang kini mengadopsi *platform* online untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat mengenai rencana kebijakan atau proyek-proyek baru yang akan dilaksanakan. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga meliputi keterlibatan dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan, serta dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya publik (Bertot et al., 2010).

Selain itu, *e-participation* juga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan warga. Proses pengambilan keputusan yang sebelumnya memerlukan waktu yang panjang dan prosedur yang rumit, kini dapat dipercepat dengan adanya *platform* online yang memungkinkan komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, *e-participation* tidak hanya meningkatkan keterlibatan warga negara dalam demokrasi, tetapi juga memperbaiki kualitas pengambilan keputusan publik. Warga negara dapat memberikan input secara langsung dan segera terhadap kebijakan yang sedang dipertimbangkan, memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan masyarakat.

Namun, meskipun *e-participation* menawarkan berbagai manfaat, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masalah privasi dan keamanan data. Partisipasi digital mengharuskan pengguna untuk berbagi informasi pribadi *dalam platform online*, yang bisa berisiko jika data tersebut tidak dikelola dengan baik. Perlindungan data pribadi dan transparansi dalam pengumpulan serta penggunaan data merupakan isu penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap implementasi *e-participation*. Selain itu, masalah kepercayaan terhadap platform digital juga menjadi tantangan yang perlu diatasi, karena warga negara harus merasa yakin bahwa platform tersebut aman dan tidak digunakan untuk kepentingan politik atau bisnis tertentu (Bertot et al., 2010). *E-participation*, meskipun membawa banyak keuntungan dalam hal meningkatkan partisipasi politik dan pemerintahan yang lebih responsif, memerlukan perhatian yang cermat terhadap isu-isu seperti akses, kepercayaan, dan privasi. Pengembangan yang lebih inklusif dan aman dari *platform e-participation* dapat meningkatkan kualitas demokrasi digital dan memberi lebih banyak kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses politik secara langsung.

D. Petisi Online dan Mobilisasi Politik Digital

Petisi online telah muncul sebagai salah satu bentuk paling mencolok dalam mobilisasi politik digital. Teknologi internet memungkinkan warga negara untuk dengan cepat menyuarakan pendapat dan mengorganisir dukungan terhadap isu-isu yang relevan secara sosial dan politik. Petisi online, yang sering kali diluncurkan melalui *platform* digital seperti Change.org atau situs serupa, memberikan kesempatan bagi individu untuk mengumpulkan tanda tangan dan dukungan untuk berbagai tujuan politik, mulai dari perubahan kebijakan hingga keadilan sosial. Fungsi utama dari petisi online adalah untuk memberikan saluran bagi warga negara agar dapat mengekspresikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik secara langsung (Lievrouw, 2011).

Petisi online sering kali digunakan untuk menggugat kebijakan atau tindakan yang dianggap tidak adil atau merugikan masyarakat. Proses ini umumnya dimulai dengan pernyataan atau tuntutan terkait isu tertentu yang mempengaruhi kepentingan publik. Setelah itu, individu dapat memberikan dukungan dengan menandatangani petisi tersebut, yang selanjutnya diharapkan untuk mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan atau pihak berwenang. Keunggulan utama dari petisi *online* terletak pada kemampuannya untuk menggerakkan massa dengan cepat dan efisien, serta menciptakan kesadaran luas mengenai isu-isu yang perlu diperjuangkan. Berbeda dengan petisi tradisional yang memerlukan pengumpulan tanda tangan secara fisik, petisi online dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia, memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam proses tersebut, terlepas dari lokasi geografis mereka (Lievrouw, 2011).

Penting untuk dicatat bahwa petisi online tidak hanya sekadar sarana pengumpulan tanda tangan, tetapi juga berfungsi sebagai alat mobilisasi politik yang lebih luas. *Platform* petisi memungkinkan individu atau kelompok untuk menggalang dukungan, menyebarkan informasi terkait isu tertentu, serta menciptakan ruang bagi diskusi publik. Dalam banyak kasus, petisi online berperan sebagai titik awal dari gerakan sosial yang lebih besar, yang akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan atau mengubah pandangan publik. Sebagai contoh, berbagai petisi online terkait isu hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, atau kebijakan ekonomi telah mengundang perhatian luas dan menstimulasi tindakan dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan (Tufekci, 2014).

Mobilisasi politik digital juga berperan penting dalam memperkuat dampak dari petisi *online*. Teknologi digital, termasuk media sosial, memungkinkan informasi mengenai petisi untuk tersebar dengan cepat melalui berbagai jaringan sosial. Melalui platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, individu dapat membagikan petisi dan mengajak orang lain untuk bergabung, sehingga memperluas jangkauan dan dampaknya. Proses ini sering disebut sebagai "viral mobilization", sehingga

pesan atau petisi dapat menyebar dengan sangat cepat berkat dukungan dari komunitas daring. Proses penyebaran ini memanfaatkan prinsip jaringan sosial, di mana informasi dibagikan dari satu individu ke individu lainnya, menciptakan efek bola salju yang memungkinkan mobilisasi lebih banyak orang untuk bertindak (Tufekci, 2014).

Namun, meskipun petisi *online* dan mobilisasi politik digital menawarkan peluang besar dalam hal memperluas keterlibatan politik, beberapa tantangan dan masalah juga muncul. Salah satunya adalah keterbatasan pengaruh yang dimiliki oleh petisi tersebut. Petisi *online* sering kali dipandang sebagai alat yang lebih mudah diakses, tetapi tidak selalu menghasilkan perubahan yang konkret. Hal ini dikarenakan, meskipun sebuah petisi dapat mengumpulkan ribuan atau bahkan jutaan tanda tangan, pengaruhnya terhadap pembuatan kebijakan sering kali terbatas tanpa adanya mobilisasi lebih lanjut atau dukungan dari kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan politik yang lebih besar. Petisi digital, tanpa tindakan lanjutan seperti demonstrasi atau lobi politik, dapat berisiko menjadi simbolis belaka dan tidak berdampak signifikan pada kebijakan yang sedang dibahas (Lievrouw, 2011).

Selain itu, masalah terkait dengan privasi dan keamanan data juga menjadi perhatian dalam penggunaan petisi online. Banyak *platform* petisi digital yang mengumpulkan informasi pribadi dari individu yang menandatangani petisi, dan ada kekhawatiran mengenai bagaimana data tersebut digunakan atau disalahgunakan. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait dengan transparansi *platform*, serta bagaimana data pribadi dijaga dan digunakan dalam konteks politik. Kepercayaan pengguna terhadap keamanan *platform* petisi online sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengumpulan tanda tangan dan partisipasi politik melalui platform tersebut tetap aman dan efektif.

Dengan meningkatnya adopsi teknologi digital, mobilisasi politik melalui petisi *online* berpotensi mengubah cara tradisional dalam penyampaian suara politik. Meskipun ada beberapa

tantangan yang perlu diatasi, potensi untuk meningkatkan partisipasi politik dan mempengaruhi kebijakan publik melalui petisi *online* tetap menjadi aspek penting dalam demokrasi digital.

E. Kampanye Politik di Era Digital

Kampanye politik di era digital telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi digital memungkinkan partai politik dan calon legislatif untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih tersegmentasi dengan menggunakan berbagai *platform*, mulai dari situs web, email, hingga media sosial. Kampanye politik digital memberikan kesempatan untuk memperkenalkan pesan politik dengan cara yang lebih personal dan interaktif, mengubah cara tradisional dalam berkomunikasi dengan pemilih. Salah satu perubahan terbesar dalam kampanye politik digital adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi dan menargetkan pemilih berdasarkan data dan preferensi mereka. Data ini dikumpulkan melalui interaksi di berbagai *platform* digital, memungkinkan strategi kampanye yang lebih efisien dan efektif dalam mencapai audiens yang tepat (Enli, 2017).

Salah satu aspek penting dalam kampanye politik digital adalah penggunaan media sosial sebagai alat utama dalam berkomunikasi dengan pemilih. *Platform* seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube menjadi sarana utama bagi politisi untuk menyebarkan pesan dan memperkenalkan diri mereka kepada publik. Media sosial memberikan ruang bagi kampanye politik untuk berbicara langsung dengan pemilih tanpa melalui media massa tradisional, yang sering kali menjadi filter pesan. Melalui media sosial, kandidat dapat mengatur narasi yang ingin disampaikan, berinteraksi langsung dengan pemilih, dan merespons isu yang muncul dengan lebih cepat dan lebih fleksibel (Enli, 2017). Interaksi ini tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga memungkinkan pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam percakapan politik, baik melalui komentar, berbagi konten, maupun menciptakan konten sendiri yang mendukung kandidat tertentu.

Selain itu, teknologi digital memungkinkan kampanye untuk melakukan segmentasi audiens yang lebih mendalam dan lebih canggih. Melalui analisis data, kampanye politik dapat mengidentifikasi kelompok pemilih berdasarkan berbagai variabel, seperti usia, jenis kelamin, lokasi geografis, dan bahkan preferensi politik sebelumnya. Dengan menggunakan teknik-teknik analisis data besar (*big data*) dan algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*), kampanye dapat merancang pesan yang sangat terpersonalisasi untuk setiap segmen audiens. Strategi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memungkinkan kampanye untuk berbicara dengan audiens yang sangat terfokus, meningkatkan peluang untuk memperoleh dukungan yang lebih besar dari pemilih yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau oleh kampanye konvensional (Boulianne, 2015).

Kampanye politik digital juga memiliki kemampuan untuk mengubah dinamika dalam cara pesan politik disebarkan. Pada era sebelumnya, media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar memegang peran dominan dalam penyebaran informasi politik. Namun, dengan munculnya kampanye digital, calon legislatif dan partai politik kini dapat mengelola narasi dan distribusi pesan secara langsung melalui saluran yang mereka kontrol, seperti situs web resmi dan akun media sosial pribadi. Hal ini memungkinkan publik untuk menghindari kontrol atau penyaringan dari media massa, yang sering kali dapat mempengaruhi cara pesan diterima oleh audiens (Boulianne, 2015). Sebagai contoh, dalam kampanye presiden di Amerika Serikat, Donald Trump menggunakan Twitter sebagai *platform* utama untuk menyampaikan pesan dan membentuk citra dirinya, yang memungkinkan langsung berinteraksi dengan pendukung dan menanggapi kritik tanpa perantara.

Namun, meskipun kampanye politik digital menawarkan banyak peluang, terdapat juga tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan informasi yang tidak akurat atau hoaks yang dapat dengan mudah tersebar melalui media sosial. Penyebaran informasi yang salah dapat memengaruhi opini publik dan merusak integritas pemilu. Oleh

karena itu, penting untuk memastikan bahwa kampanye politik digital mematuhi pedoman etika dan transparansi dalam menyebarkan informasi. Selain itu, keberhasilan kampanye politik digital juga sangat bergantung pada infrastruktur digital yang memadai dan cakupan akses internet yang merata di seluruh masyarakat. Di beberapa daerah, ketimpangan dalam akses terhadap teknologi informasi dapat menjadi hambatan bagi efektivitas kampanye digital, karena tidak semua individu memiliki akses yang setara ke perangkat dan jaringan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam diskursus politik digital (Enli, 2017).

Selain itu, masalah privasi dan keamanan data juga menjadi perhatian utama dalam kampanye politik digital. Penggunaan data pribadi untuk menargetkan pemilih dapat menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana data tersebut dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data pribadi atau penyalahgunaan data oleh kampanye politik dapat merusak kepercayaan publik dan menurunkan partisipasi dalam proses demokrasi digital. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan ketat terkait dengan perlindungan data pribadi serta transparansi dalam pengumpulan data sangat penting untuk menjaga integritas kampanye politik digital.

Kampanye politik di era digital telah membawa perubahan mendalam dalam cara berkomunikasi antara calon politisi dan pemilih. Teknologi digital memungkinkan untuk menyebarkan pesan politik dengan cara yang lebih efisien dan lebih terukur, sementara media sosial membuka ruang bagi partisipasi yang lebih langsung dan personal. Namun, penting untuk menyadari bahwa tantangan yang dihadapi dalam kampanye digital, seperti penyebaran informasi yang salah dan isu-isu terkait privasi, memerlukan perhatian serius agar kampanye ini tetap berlangsung dengan adil dan transparan.

F. Peran *Influencer* dan Aktivis Digital dalam Demokrasi

Influencer dan aktivis digital memainkan peran yang semakin penting dalam perkembangan demokrasi digital,

khususnya dalam membentuk opini publik, meningkatkan partisipasi politik, dan memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam isu-isu sosial. Di era digital, individu yang memiliki basis pengikut yang besar di *platform* media sosial seperti Instagram, Twitter, dan YouTube, berfungsi sebagai penghubung yang efektif antara isu politik dan masyarakat luas. Publik menggunakan kekuatan media sosial untuk menyebarkan pesan, membentuk narasi politik, dan mendorong perubahan sosial. Selain itu, aktivis digital menggunakan teknologi untuk mengorganisir protes, kampanye, dan gerakan sosial yang dapat mempengaruhi keputusan politik serta mendorong perubahan kebijakan. Seiring berkembangnya teknologi, peran *influencer* dan aktivis digital semakin terintegrasi dalam dinamika politik modern, membawa dampak signifikan terhadap cara demokrasi dijalankan (Marwick & Boyd, 2011).

Influencer di media sosial sering kali berfungsi sebagai pendorong perubahan sosial dengan memanfaatkan popularitas dan pengaruhnya untuk mengajak audiensnya berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik dan sosial. Pengaruh yang dimiliki *influencer* tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi, tetapi juga dalam membentuk preferensi politik dan nilai-nilai sosial di kalangan pengikutnya. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Marwick dan Boyd (2011), *influencer*, terutama di *platform* seperti Twitter dan Instagram, mampu menciptakan diskursus yang membentuk pandangan politik audiensnya. Contohnya, pada pemilihan umum, *influencer* dapat mengajak pengikutnya untuk memilih kandidat tertentu atau untuk mendukung gerakan sosial yang berfokus pada isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, atau kesetaraan gender. Penyebaran pesan melalui *influencer* memungkinkan calon legislatif atau organisasi sosial untuk mengakses segmen pemilih yang lebih muda, yang mungkin tidak terjangkau oleh media tradisional. Oleh karena itu, peran *influencer* dalam demokrasi digital lebih dari sekedar sebagai pembuat konten; *influencer* juga menjadi agen perubahan yang dapat membentuk lanskap politik dengan cara yang baru dan lebih terhubung dengan audiens global.

Aktivis digital, yang sering kali bekerja di luar ruang publik formal, juga memainkan peran krusial dalam demokrasi digital. Aktivis ini menggunakan berbagai *platform* online untuk mengorganisir protes, memperjuangkan hak-hak tertentu, dan membangkitkan kesadaran akan isu-isu yang sering kali diabaikan oleh media arus utama. Aktivis digital, seperti yang terlihat dalam gerakan #MeToo dan #BlackLivesMatter, dapat memobilisasi ribuan orang untuk berpartisipasi dalam kampanye atau demonstrasi. Gerakan-gerakan ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat menghubungkan individu-individu yang memiliki tujuan bersama, menghilangkan hambatan geografis, dan memungkinkan orang-orang untuk berorganisasi dengan cara yang tidak terikat pada batasan-batasan fisik (Tufekci, 2014). Aktivis digital sering kali mengandalkan strategi viralitas untuk menarik perhatian publik terhadap isu-isu tertentu, menggunakan tagar dan kampanye berbasis hashtag yang mampu menjangkau audiens luas dalam waktu singkat. Hal ini menjadi elemen kunci dalam memobilisasi dukungan masyarakat terhadap gerakan sosial atau politik.

Selain itu, *influencer* dan aktivis digital juga memainkan peran dalam meningkatkan akuntabilitas politik dengan mengawasi kebijakan publik dan menyebarkan informasi yang relevan. Dalam banyak kasus, *influencer* dapat menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah atau praktik korupsi dengan cara yang dapat mempercepat perubahan kebijakan. Aktivis digital juga bekerja untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan keinginan rakyat dan tidak hanya kepentingan segelintir elit politik. Dengan adanya transparansi yang dibawa oleh teknologi, masyarakat kini memiliki lebih banyak akses terhadap informasi yang dapat mempengaruhi keputusan politik, dan *influencer* serta aktivis digital berperan besar dalam menyediakan informasi tersebut kepada publik (Tufekci, 2014).

Di sisi lain, peran *influencer* dan aktivis digital tidak lepas dari tantangan dan kontroversi. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah soal kredibilitas informasi yang disebar.

Sebagai pihak yang memiliki pengaruh besar, *influencer* dan aktivis digital sering kali terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau bahkan hoaks, yang dapat merusak kredibilitas *influencer* serta mengarah pada polarisasi dalam masyarakat. Selain itu, potensi penyalahgunaan pengaruh ini untuk tujuan politik tertentu menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius, terutama dalam konteks kampanye politik. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur aktivitas *influencer* dan aktivis digital, baik dari segi etika maupun transparansi dalam penyebaran informasi, sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi digital.

Influencer dan aktivis digital berperan dalam demokrasi digital dengan cara yang dapat memperluas partisipasi politik, membentuk opini publik, dan mengorganisir gerakan sosial. Pengaruh *influencer* dalam dunia digital telah menciptakan bentuk baru dari interaksi politik yang lebih langsung dan personal, menjangkau pemilih dan masyarakat dalam cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Namun, penting untuk memahami tantangan yang dihadapi, seperti kredibilitas informasi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan, untuk memastikan bahwa peran ini tetap konstruktif dalam menjaga demokrasi yang sehat dan inklusif.

G. Tantangan Partisipasi Digital bagi Kelompok Rentan di Indonesia

Partisipasi digital merupakan elemen kunci dalam memperkuat demokrasi digital dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, sosial, dan ekonomi. Namun, tidak semua kelompok dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam dunia digital. Kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, orang tua, masyarakat pedesaan, dan kelompok dengan keterbatasan ekonomi, sering kali menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengakses dan menggunakan teknologi digital untuk tujuan partisipasi. Ketidaksetaraan akses ini menciptakan hambatan bagi kelompok-

kelompok tersebut untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan digital dan politik.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi kelompok rentan dalam partisipasi digital adalah ketidakmampuan untuk mengakses teknologi yang diperlukan. Masyarakat pedesaan, , sering kali menghadapi keterbatasan infrastruktur digital, seperti konektivitas internet yang tidak stabil atau tidak memadai. Kondisi ini membatasi kemampuan mereka untuk terhubung dengan sumber informasi penting dan berpartisipasi dalam aktivitas politik atau sosial yang berlangsung di platform digital. Dengan kata lain, ketidaksetaraan akses terhadap internet dapat memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat kemampuan individu dari kelompok rentan untuk ikut serta dalam diskursus digital. Tanpa akses yang memadai, partisipasi digital menjadi eksklusif dan hanya dapat dinikmati oleh segmen-segmen masyarakat tertentu, yang lebih mampu secara ekonomi dan memiliki akses lebih baik terhadap teknologi.

Selain masalah akses, tantangan lain yang dihadapi oleh kelompok rentan dalam partisipasi digital adalah kurangnya keterampilan teknologi. Kelompok-kelompok ini, terutama orang tua dan individu dengan tingkat pendidikan rendah, sering kali tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan alat digital dengan efisien. Menurut penelitian oleh van Deursen dan van Dijk (2014), literasi digital merupakan faktor penting dalam kemampuan individu untuk berpartisipasi secara efektif di dunia maya. Tanpa keterampilan yang cukup, individu tidak hanya kesulitan mengakses informasi, tetapi juga dalam berinteraksi dengan platform-platform yang digunakan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik itu pemilu, diskusi publik, atau kampanye sosial. Literasi digital yang rendah pada kelompok rentan ini membatasi potensi kelompok rentan untuk berperan aktif dalam proses-proses demokratis yang berkembang di ruang digital.

Tantangan lain yang signifikan adalah masalah kesenjangan ekonomi yang memperburuk keterbatasan akses. Banyak keluarga dari kelompok rentan tidak mampu membeli perangkat teknologi

yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara digital. Tidak hanya itu, biaya untuk menggunakan internet yang stabil dan cepat juga menjadi hambatan besar. Dalam beberapa kasus, bahkan jika perangkat tersedia, ketergantungan pada layanan internet yang mahal atau tidak stabil menghalangi individu untuk terlibat dalam partisipasi digital secara penuh. Hal ini menciptakan ketimpangan yang mendalam, di mana hanya kelompok-kelompok yang lebih mampu secara ekonomi yang dapat menikmati manfaat partisipasi digital, sementara kelompok yang kurang mampu tetap tertinggal. Studi oleh DiMaggio et al., (2004) menunjukkan bahwa kesenjangan dalam akses teknologi tidak hanya terbatas pada infrastruktur, tetapi juga pada akses yang terbatas terhadap perangkat yang diperlukan untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses politik.

Selain itu, adanya hambatan sosial dan budaya juga mempengaruhi tingkat partisipasi digital pada kelompok rentan. Sebagai contoh, masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda, seperti kelompok minoritas atau komunitas dengan bahasa yang kurang dikenal, sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses konten digital yang relevan dengan mereka. Situs web dan *platform* sering kali hanya tersedia dalam bahasa mayoritas, dan informasi yang tersedia tidak selalu sensitif terhadap keanekaragaman budaya atau sosial. Hal ini menghalangi kelompok rentan dalam memahami isu-isu politik atau sosial yang penting bagi kalangannya. Ketidakmampuan untuk mengakses informasi yang sesuai dengan konteks budaya mereka membatasi partisipasi dalam demokrasi digital dan mengurangi keberagaman suara dalam ruang publik digital.

BAB 4

PENGARUH MEDIA DAN DISINFORMASI DALAM DEMOKRASI DIGITAL

A. Pendahuluan

Pengaruh media dan disinformasi dalam demokrasi digital merujuk pada peran teknologi komunikasi dalam membentuk opini publik serta tantangan yang muncul akibat penyebaran informasi yang tidak akurat. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara individu mengakses, menyebarkan, dan berinteraksi dengan informasi politik. Media digital memungkinkan arus informasi yang lebih cepat dan luas, memberikan kesempatan bagi publik untuk memahami isu-isu demokratis dengan lebih mendalam. Namun, di sisi lain, disinformasi menjadi ancaman yang dapat mengganggu proses demokrasi dengan memanipulasi persepsi publik terhadap realitas politik.

Pemahaman mengenai pengaruh media dan disinformasi dalam demokrasi digital menjadi penting karena akses terhadap informasi politik kini semakin bergantung pada *platform* daring. Media sosial, situs berita digital, dan aplikasi berbasis teknologi menyediakan informasi dalam berbagai bentuk, mulai dari teks, gambar, hingga video interaktif. Arus informasi yang begitu cepat menciptakan tantangan dalam membedakan antara berita yang kredibel dan informasi yang menyesatkan. Algoritma media sosial yang dirancang untuk menampilkan konten berdasarkan preferensi pengguna berpotensi memperkuat bias kognitif,

mempersempit wawasan, serta menciptakan ruang gema yang menghambat diskusi demokratis yang sehat.

Disinformasi dalam demokrasi digital sering kali dimanfaatkan untuk membentuk opini publik secara manipulatif. Berbagai teknik, seperti deepfake, bot otomatis, serta propaganda politik berbasis algoritma, digunakan untuk menyebarkan narasi yang dapat memengaruhi keputusan politik individu. Informasi yang tidak berbasis fakta berpotensi menciptakan polarisasi di tengah masyarakat, meningkatkan ketidakpercayaan terhadap institusi demokratis, serta menghambat pengambilan keputusan yang rasional dalam konteks politik. Selain itu, berita palsu yang dirancang untuk menimbulkan kepanikan atau ketidakstabilan sosial dapat berdampak negatif terhadap legitimasi pemilu, kredibilitas pemerintah, serta partisipasi publik dalam proses demokrasi.

Keamanan informasi menjadi aspek krusial dalam menghadapi tantangan disinformasi dalam demokrasi digital. Regulasi yang mendukung transparansi media, upaya verifikasi fakta yang lebih luas, serta peningkatan literasi digital berperan dalam memitigasi dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak akurat. Pendidikan mengenai cara mengenali berita palsu, memahami pola propaganda digital, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam mengonsumsi informasi dapat meningkatkan ketahanan terhadap disinformasi. Penguatan jurnalisme berbasis fakta serta pengawasan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem demokrasi digital yang lebih sehat dan transparan.

Tantangan lain dalam pengaruh media terhadap demokrasi digital terletak pada kepentingan ekonomi dan politik yang sering kali memengaruhi distribusi informasi. Kepemilikan media yang terpusat, kepentingan bisnis dalam industri periklanan digital, serta intervensi politik dalam pengelolaan informasi dapat membentuk narasi tertentu yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Transparansi dalam algoritma distribusi informasi, penguatan independensi media, serta partisipasi publik dalam

mengawasi ekosistem informasi digital menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi di era digital.

Perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi data besar turut berkontribusi dalam membentuk ekosistem informasi dalam demokrasi digital. Teknologi ini dapat digunakan untuk menganalisis pola opini publik, mengidentifikasi tren politik, serta meningkatkan personalisasi konten berita. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, teknologi semacam ini juga dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi informasi secara sistematis, sehingga menghambat demokrasi yang berbasis pada keterbukaan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengaruh media dan disinformasi dalam demokrasi digital menjadi aspek fundamental dalam memastikan keberlanjutan demokrasi yang inklusif, adil, serta berbasis pada informasi yang akurat dan kredibel.

B. Peran Media Digital dalam Demokrasi

Media digital memainkan peran yang semakin penting dalam konteks demokrasi modern. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara informasi disebarluaskan, dipertukarkan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam konteks ini, media digital tidak hanya berfungsi sebagai alat penyebar informasi, tetapi juga sebagai ruang untuk berdiskusi, berdebat, dan menyuarakan aspirasi politik. Fungsi ini semakin relevan mengingat tantangan dalam menjaga keterlibatan publik dalam proses politik dan pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun lokal.

Salah satu aspek utama yang dimediasi oleh media digital dalam demokrasi adalah akses terhadap informasi yang lebih terbuka dan transparan. Dalam sistem demokrasi tradisional, informasi sering kali terbatas pada saluran media yang dikuasai oleh entitas besar, baik itu pemerintah atau perusahaan media besar. Dengan kemunculan *platform* digital, akses terhadap informasi menjadi lebih demokratis, karena siapapun dapat mempublikasikan pendapat atau informasi melalui media sosial, blog, atau situs web. Studi oleh McChesney (2013) menjelaskan

bagaimana internet telah menciptakan potensi baru bagi demokrasi dengan memungkinkan lebih banyak individu untuk mendapatkan informasi secara bebas, tanpa kontrol yang ketat dari otoritas tertentu. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah, memperluas wacana publik, dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, media digital memainkan peran dalam memperkuat partisipasi politik. *Platform* media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan calon pemimpin, membahas isu-isu politik, dan terlibat dalam kampanye politik. Fenomena ini memberikan dampak signifikan dalam hal aksesibilitas dan keterlibatan warga negara dalam politik. Menurut penelitian oleh Shirky (2011), media sosial tidak hanya memungkinkan komunikasi dua arah antara warga negara dan pemerintah, tetapi juga memungkinkan pembentukan gerakan sosial yang dapat mengubah kebijakan atau bahkan sistem pemerintahan. Salah satu contohnya adalah penggunaan media sosial dalam gerakan protes yang terjadi di berbagai negara, yang menunjukkan bagaimana platform ini menjadi sarana mobilisasi kolektif dalam rangka meraih tujuan politik tertentu.

Media digital juga memungkinkan penyebaran berbagai perspektif yang sebelumnya tidak dapat terwakili dalam media mainstream. Dalam konteks demokrasi, keberagaman informasi adalah elemen penting yang mendukung pluralitas dan kebebasan berekspresi. *Platform* digital memberikan kesempatan bagi berbagai kelompok minoritas atau yang terpinggirkan untuk berbicara dan memperkenalkan isu-isu kepada publik yang lebih luas. Hal ini sangat penting dalam konteks negara demokratis yang menekankan prinsip kebebasan berbicara dan pluralisme. Dengan demikian, media digital telah berfungsi untuk memperkaya diskursus politik dengan memperkenalkan berbagai perspektif, baik dari individu, kelompok sosial, atau organisasi yang sebelumnya sulit memperoleh akses ke media tradisional.

Keberagaman ini memperkuat pluralisme dalam demokrasi dan mendorong terciptanya ruang publik yang lebih inklusif.

Namun, media digital juga memiliki dampak negatif terhadap demokrasi, terutama dalam hal penyebaran informasi yang salah atau hoaks. Kecepatan penyebaran informasi di *platform* digital sering kali tidak disertai dengan kontrol yang memadai terhadap akurasi informasi tersebut. Fenomena ini semakin diperburuk dengan algoritma yang digunakan oleh *platform* media sosial yang cenderung memprioritaskan konten yang bersifat sensasional atau *polarizing*, yang dapat memperburuk perpecahan sosial dan politik. Penelitian oleh Allcott dan Gentzkow (2017) menunjukkan bahwa berita palsu yang disebar melalui media sosial dapat mempengaruhi opini publik dan mengubah perilaku pemilih dalam pemilu. Penyebaran informasi yang tidak akurat ini mengancam kualitas demokrasi karena dapat menyesatkan pemilih dan mengaburkan proses pengambilan keputusan yang seharusnya berbasis pada fakta dan bukti yang sah.

Lebih lanjut, media digital dalam demokrasi juga menghadapi tantangan terkait privasi dan keamanan data. Penggunaan *platform* digital untuk kampanye politik atau partisipasi publik sering kali melibatkan pengumpulan data pribadi yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik atau komersial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai bagaimana data pribadi digunakan tanpa sepengetahuan individu yang bersangkutan, serta dampaknya terhadap kebebasan dan keamanan individu dalam berpartisipasi dalam diskursus politik. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Zuboff (2019), mengungkapkan bagaimana perusahaan besar yang mengoperasikan *platform* digital sering kali memanfaatkan data pribadi pengguna untuk kepentingan politik atau iklan yang dapat memengaruhi preferensi pemilih dan perilaku politik.

Meskipun demikian, peran media digital dalam demokrasi tetap krusial, terutama dalam menciptakan ruang untuk keterlibatan lebih luas, pengawasan terhadap kebijakan, serta pemberdayaan publik dalam proses-proses politik. Keberagaman informasi yang dapat diperoleh dan kemampuan untuk terlibat

dalam diskusi politik secara langsung merupakan aspek positif yang tak terbantahkan dari media digital dalam memperkuat demokrasi. Di sisi lain, tantangan terkait penyebaran hoaks dan perlindungan data pribadi tetap harus dihadapi dengan kebijakan dan regulasi yang memadai untuk memastikan bahwa media digital berfungsi secara positif bagi demokrasi.

C. Fenomena *Fake News* dan Manipulasi Informasi

Fenomena *fake news* (berita palsu) telah menjadi salah satu tantangan besar dalam ekosistem informasi digital. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan internet, distribusi berita dapat dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa, memungkinkan informasi untuk tersebar secara luas hanya dalam hitungan detik. Ironisnya, hal ini juga menciptakan ruang bagi penyebaran informasi yang salah atau sengaja dimanipulasi untuk tujuan tertentu, baik itu politik, ekonomi, maupun sosial. Berita palsu sering kali dirancang untuk mempengaruhi opini publik, menyesatkan pemilih, atau meningkatkan kekuatan pihak-pihak tertentu dalam situasi politik yang sensitif.

Salah satu karakteristik utama dari *fake news* adalah keberadaannya dalam format yang sangat mirip dengan berita asli. Artikel atau informasi yang disebarakan sering kali memiliki elemen-elemen yang meyakinkan, seperti kutipan, foto, atau statistik yang tampaknya kredibel. Namun, fakta-fakta tersebut sering kali telah diputarbalikkan atau sepenuhnya fiksi. Penyebaran berita palsu ini tidak hanya dilakukan oleh individu atau kelompok dengan niat jahat, tetapi juga dapat melibatkan jaringan yang lebih besar, termasuk platform media sosial dan aktor negara yang berkepentingan untuk memengaruhi proses politik atau sosial di negara lain (Lazer et al., 2018). Sebagai contoh, penyebaran berita palsu selama pemilu sering kali bertujuan untuk menciptakan kebingungannya pemilih dan mengubah hasil pemilu.

Fake news dapat memiliki dampak yang besar terhadap demokrasi dan kepercayaan publik. Dalam konteks pemilu, informasi yang menyesatkan dapat mengubah cara pemilih

membuat keputusan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Allcott dan Gentzkow (2017) menunjukkan bahwa penyebaran berita palsu dapat memengaruhi preferensi pemilih, dengan beberapa kasus dimana informasi yang salah tentang calon tertentu tersebar luas, berpotensi merusak reputasi politik atau memengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilu. Dengan memanfaatkan *platform* media sosial, berita palsu dapat menjangkau audiens yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat, sementara kontrol terhadap informasi yang tersebar menjadi semakin sulit. Hal ini memperburuk ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi yang sah dan dapat memperburuk polarisasi sosial.

Manipulasi informasi tidak hanya terbatas pada berita palsu, tetapi juga melibatkan teknik-teknik lain seperti *deepfakes*, sehingga teknologi kecerdasan buatan digunakan untuk memanipulasi gambar atau video dengan cara yang membuatnya tampak sangat meyakinkan meskipun sebenarnya itu adalah rekayasa. *Deepfakes* dan jenis manipulasi visual lainnya dapat digunakan untuk memfitnah individu, merusak kredibilitas tokoh publik, atau menciptakan kekacauan politik dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Penyebaran konten semacam ini memanfaatkan kerentanannya audiens terhadap informasi visual yang sering dianggap lebih kredibel daripada teks, yang dapat memperburuk efek dari informasi palsu yang beredar.

Dinamika penyebaran *fake news* dan manipulasi informasi ini diperburuk oleh sifat algoritma yang digunakan oleh *platform* media sosial. Algoritma-algoritma ini cenderung memprioritaskan konten yang sensasional dan memicu emosi, baik itu kemarahan, ketakutan, atau kebencian. Hal ini berarti bahwa informasi yang berpotensi memecah belah atau yang mengandung unsur ketidakbenaran sering kali mendapatkan lebih banyak eksposur dibandingkan dengan informasi yang lebih objektif atau berbasis fakta. Menurut penelitian oleh Bakir dan McStay (2018), algoritma di media sosial memainkan peran penting dalam memperburuk fenomena informasi palsu, dengan menyebarkan konten yang paling banyak dibagikan atau dikomentari tanpa memperhatikan akurasi atau kebenarannya. Hal ini membuat pembaca atau

pengguna internet lebih mudah terjebak dalam lingkaran informasi yang salah, yang memperburuk polarisasi opini dan memperlebar jurang perbedaan sosial dan politik.

Selain itu, manipulasi informasi dalam bentuk berita palsu sering kali terhubung dengan masalah kepercayaan pada institusi-institusi tradisional, termasuk media *mainstream*. Ketika individu merasa bahwa media *mainstream* tidak lagi dapat dipercaya, individu lebih cenderung mencari informasi dari sumber yang kurang dapat dipertanggungjawabkan atau dari platform yang memperburuk bias konfirmasi (*confirmation bias*). Dengan begitu, menjadikan masyarakat lebih rentan terhadap konten yang bersifat palsu atau bias, yang pada gilirannya merusak integritas informasi yang beredar di ruang publik. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi media di kalangan masyarakat, agar mereka dapat lebih kritis dalam menyaring informasi yang diterima dari berbagai sumber (Lewandowsky et al., 2017).

Fenomena *fake news* dan manipulasi informasi dalam era digital menguji prinsip-prinsip dasar demokrasi, yaitu kebebasan informasi dan kemampuan publik untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang sah. Oleh karena itu, perlunya kebijakan yang dapat mengatur penyebaran informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai cara mengidentifikasi informasi yang dapat dipercaya menjadi semakin mendesak. Platform media sosial dan penyedia layanan informasi digital harus bertanggung jawab dalam mengembangkan algoritma yang mendukung verifikasi fakta dan pengurangan penyebaran informasi yang menyesatkan, sementara individu dan masyarakat luas perlu diberdayakan dengan keterampilan literasi media yang lebih baik untuk menanggulangi ancaman ini.

D. Algoritma Media Sosial dan Polarisasi Politik

Penggunaan algoritma oleh platform media sosial untuk menentukan konten yang ditampilkan kepada pengguna telah memunculkan sejumlah tantangan baru dalam ranah politik, salah satunya adalah polarisasi politik. Algoritma media sosial dirancang untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna dengan

menampilkan konten yang dianggap paling relevan berdasarkan perilaku dan preferensi sebelumnya. Algoritma ini, meskipun dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara individual, berpotensi memperburuk polarisasi politik di masyarakat dengan memfasilitasi pembentukan "echo chambers" atau ruang gema, di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan politik masing-masing.

Pada dasarnya, algoritma media sosial berfungsi untuk menyajikan konten yang memiliki potensi tinggi untuk menarik perhatian pengguna, dengan mengutamakan konten yang memicu emosi atau mengonfirmasi pandangan yang sudah ada. Konten-konten yang provokatif atau kontroversial, yang seringkali berisi informasi bias atau bahkan *misinformation*, lebih mungkin untuk mendapatkan eksposur lebih besar di *platform-platform* seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Hal ini terjadi karena algoritma media sosial memprioritaskan keterlibatan (*engagement*) pengguna, seperti like, komentar, atau share, daripada verifikasi kebenaran informasi. Konten yang mengundang emosi ekstrem atau menciptakan konflik cenderung menghasilkan interaksi yang lebih banyak, yang pada gilirannya meningkatkan visibilitas dan penyebarannya. Akibatnya, pengguna sering kali terpapar pada informasi yang hanya mendukung pandangan yang sudah ada, memperburuk polarisasi politik yang semakin terasa dalam masyarakat.

Polarisasi politik merujuk pada peningkatan jarak atau perbedaan yang tajam antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan politik yang berbeda, yang sering kali disertai dengan ketegangan dan permusuhan. Fenomena ini semakin mencolok dalam konteks media sosial, sehingga interaksi antar individu dengan pandangan politik yang beragam cenderung lebih terbatas. Dengan kata lain pengguna media sosial cenderung berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan politik serupa, yang memperdalam perbedaan pendapat antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Hal ini terjadi karena algoritma media sosial terus-menerus mempromosikan konten yang

menguatkan posisi ideologis pengguna dan menyaring informasi yang bertentangan dengan pandangan tersebut.

Selain itu, algoritma juga memainkan peran penting dalam memperburuk efek *echo chambers* dengan menyesuaikan konten berdasarkan riwayat pencarian dan interaksi sebelumnya. Ketika pengguna sering mencari atau berinteraksi dengan konten yang mendukung sudut pandang tertentu, algoritma akan terus memunculkan konten yang lebih banyak serupa dengan apa yang telah dikonsumsi sebelumnya. Hal ini menciptakan lingkaran tertutup informasi yang mengarah pada radikalisasi pandangan politik. Sebagai contoh, pengguna yang terpapar konten ekstrem atau partisan cenderung semakin terpolarisasi dan semakin menjauh dari sudut pandang yang lebih moderat atau kompromistis.

Polarisasi politik yang semakin mendalam akibat algoritma media sosial dapat memperburuk ketidakpercayaan antar kelompok dan individu dalam masyarakat. Ketika seseorang hanya terpapar pada pandangan yang konsisten dengan keyakinannya, ada kecenderungan untuk memandang pihak lain sebagai "musuh" atau kelompok yang tidak dapat dipahami. Hal ini memperburuk polarisasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, dari percakapan sehari-hari hingga perdebatan politik yang lebih besar. Selain itu, fenomena ini juga mempengaruhi kualitas debat publik, yang seharusnya didasarkan pada informasi yang akurat dan argumentasi rasional, namun sering kali terdistorsi oleh keberadaan informasi yang tidak objektif atau bias.

Dalam konteks politik digital, dampak dari polarisasi yang disebabkan oleh algoritma media sosial sangat terlihat dalam dinamika pemilu dan kebijakan publik. Selama kontestasi electoral, para pengguna yang terjebak dalam *filter bubble* cenderung tidak menerima informasi yang berimbang atau faktual mengenai kandidat atau kebijakan. Sebaliknya, pemilih hanya terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan politik yang sudah ada, yang dapat memperburuk ketegangan politik dan mengurangi kualitas diskursus publik.

Hal ini tidak hanya memperburuk polarisasi, tetapi juga memengaruhi tingkat partisipasi politik, yang berisiko mengarah pada ketidakstabilan politik jika sebagian besar populasi tidak dapat lagi menemukan titik temu dalam dialog politik yang konstruktif. Oleh karena itu, meskipun algoritma media sosial dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dengan konten yang lebih relevan secara personal, dampak negatif yang ditimbulkan dalam hal polarisasi politik dan disinformasi sangat signifikan. Masyarakat digital yang semakin terfragmentasi ini menuntut intervensi yang bijak dalam pengaturan algoritma media sosial untuk memastikan bahwa *platform* tidak hanya mengutamakan keuntungan jangka pendek dari keterlibatan pengguna, tetapi juga mempromosikan informasi yang lebih objektif dan seimbang guna menjaga kestabilan sosial dan politik.

E. Antisipasi Hoaks dalam Pemilu Digital

Hoaks, atau informasi yang sengaja disebar dengan tujuan menyesatkan publik, telah menjadi salah satu tantangan besar dalam era digital, terutama dalam konteks pemilu. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, hoaks tidak hanya tersebar lebih cepat, tetapi juga lebih sulit untuk dideteksi dan dihentikan. Dalam pemilu digital, sehingga media sosial menjadi sarana utama untuk menyebarkan informasi, hoaks dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam memengaruhi opini publik, mengubah persepsi pemilih, dan bahkan mengganggu proses demokrasi itu sendiri. Hoaks yang sengaja disebar untuk mendiskreditkan calon atau memanipulasi opini publik dapat menambah ketidakpastian dan ketegangan dalam proses pemilu, dengan dampak yang sering kali tidak dapat diprediksi.

Di dunia digital, hoaks dapat tersebar melalui berbagai saluran, mulai dari media sosial hingga aplikasi pesan instan, dengan penyebaran yang lebih luas dibandingkan dengan cara tradisional. Hal ini dikarenakan karakteristik media sosial yang memungkinkan konten viral dengan cepat, sehingga sebuah informasi dapat dibagikan dan dilihat oleh jutaan orang dalam

waktu singkat. Dalam banyak kasus, hoaks yang beredar sering kali disertai dengan narasi yang emosional atau provokatif, yang membuatnya lebih menarik dan mudah diterima oleh audiens. Ketika informasi yang salah ini diterima tanpa verifikasi, ia dapat mengarah pada pembentukan persepsi yang keliru mengenai kandidat atau kebijakan tertentu. Sebagai contoh, berita palsu tentang kandidat yang terlibat dalam skandal dapat merusak reputasi politiknya dan memengaruhi hasil pemilu.

Fenomena hoaks dalam pemilu digital sering kali dipengaruhi oleh algoritma media sosial yang memprioritaskan konten yang menarik perhatian, tanpa mempedulikan kebenaran atau keakuratan informasi. Hal ini menciptakan ruang bagi informasi palsu untuk tersebar lebih cepat daripada informasi yang lebih akurat atau berbasis fakta. Dalam hal ini, algoritma sering kali memperburuk situasi dengan memperbesar jangkauan informasi yang sensasional, meskipun informasi tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Polarisasi politik yang semakin meningkat dalam masyarakat juga berperan dalam memperburuk penyebaran hoaks, karena individu cenderung lebih mudah menerima informasi yang mendukung pandangan politik dan menolak informasi yang bertentangan dengan pandangan tersebut (Vosoughi et al., 2018).

Penyebaran hoaks dalam konteks pemilu digital menuntut adanya langkah-langkah yang efektif untuk mengidentifikasi, menanggulangi, dan mengurangi dampaknya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui literasi media, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan menilai kualitas informasi yang diterima. Literasi media yang baik dapat membantu pemilih untuk lebih kritis dalam menyaring informasi, membedakan antara fakta dan opini, serta mengidentifikasi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, pemahaman mengenai cara kerja algoritma media sosial dan potensi bias dalam penyebaran informasi dapat menjadi salah satu kunci untuk mengurangi dampak hoaks.

Selain itu, *platform* media sosial juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi penyebaran hoaks. Beberapa

platform besar, seperti Facebook dan Twitter, telah mulai mengimplementasikan kebijakan untuk menandai atau menghapus konten yang terbukti mengandung informasi palsu atau misinformasi. Tindakan ini termasuk menambahkan label peringatan pada postingan yang terdeteksi mengandung klaim yang tidak dapat diverifikasi atau yang telah dibantah oleh sumber yang kredibel. Upaya ini tidak hanya melibatkan teknologi otomatis untuk mendeteksi hoaks, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari organisasi pemeriksa fakta untuk memverifikasi informasi yang beredar. Dengan cara ini, diharapkan penyebaran hoaks dapat diminimalisir, dan pemilih dapat lebih percaya pada kualitas informasi yang diterima (Pennycook & Rand, 2018).

Namun, meskipun *platform* media sosial telah mulai mengambil langkah-langkah untuk menangani hoaks, tantangan utama tetap ada dalam mengatasi penyebaran informasi palsu yang terus berkembang dengan cepat dan kreatif. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, penyedia *platform*, organisasi masyarakat sipil, dan sektor pendidikan menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat. Pemerintah dapat memainkan peran penting dengan merancang kebijakan yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab di dunia digital. Kebijakan yang lebih ketat mengenai penyebaran informasi yang tidak benar, terutama yang dapat memengaruhi proses demokrasi, perlu diimbangi dengan upaya untuk melindungi kebebasan berekspresi.

F. Regulasi *Platform* Digital dalam Disinformasi

Disinformasi, atau informasi yang sengaja disebar untuk menyesatkan publik, telah menjadi salah satu tantangan besar di era digital. Penyebaran disinformasi melalui *platform* digital, terutama media sosial, telah merusak proses demokrasi, menciptakan kebingungan publik, dan bahkan mempengaruhi hasil pemilu serta keputusan politik. *Platform* digital yang populer, seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, memiliki jangkauan yang sangat luas, memungkinkan informasi untuk tersebar dalam

hitungan detik ke berbagai penjuru dunia. Dalam konteks ini, regulasi *platform* digital untuk menangani disinformasi menjadi sangat penting, agar penyebaran informasi yang salah dapat diminimalisir dan dampaknya dapat dikendalikan.

Platform digital, dengan kemampuan algoritmik mereka, berperan penting dalam mempercepat penyebaran informasi. Algoritma ini sering kali berfokus pada konten yang paling menarik atau emosional, tanpa memeriksa kebenaran atau validitas informasi tersebut. Hal ini menciptakan ruang bagi disinformasi untuk berkembang, mengingat bahwa berita palsu atau informasi yang menyesatkan cenderung lebih sensasional dan menarik perhatian. Dalam banyak kasus, disinformasi ini sering kali lebih cepat tersebar dibandingkan dengan informasi yang faktual dan terpercaya (Vosoughi et al., 2018). Oleh karena itu, regulasi yang tepat untuk mengatur cara *platform* digital menangani disinformasi sangat diperlukan untuk menjaga integritas informasi yang beredar di dunia maya.

Salah satu bentuk regulasi yang dapat diterapkan adalah dengan mengharuskan platform untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah legislatif untuk memaksa perusahaan media sosial agar bertanggung jawab atas konten yang dipublikasikan di *platform*. Contohnya, di Uni Eropa, dalam kerangka Digital Services Act (DSA), *platform* digital diwajibkan untuk melakukan tindakan proaktif dalam mendeteksi dan menghapus konten yang mengandung disinformasi, terutama yang dapat membahayakan keamanan publik atau mengganggu proses demokrasi. DSA juga menetapkan kewajiban bagi *platform* untuk menyediakan alat bagi pengguna untuk melaporkan konten yang tidak benar, serta meningkatkan transparansi mengenai bagaimana algoritma memprioritaskan konten. Dengan cara ini, diharapkan penyebaran disinformasi dapat lebih terkontrol.

Di Amerika Serikat, meskipun tidak ada regulasi tunggal yang mengatur disinformasi secara langsung, ada berbagai inisiatif yang mendorong *platform* digital untuk lebih bertanggung jawab dalam menangani informasi palsu. Contohnya, Twitter dan

Facebook telah mengimplementasikan kebijakan untuk menandai atau menghapus informasi yang terbukti salah atau menyesatkan. *Platform-platform* ini bekerja sama dengan organisasi pemeriksa fakta independen untuk menilai kebenaran klaim yang beredar di *platform*. Namun, upaya ini belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi masalah disinformasi, terutama karena kurangnya standar yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten di tingkat nasional. Di sisi lain, beberapa pengamat menilai bahwa regulasi semacam ini harus tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap kebenaran informasi (Pennycook & Rand, 2018).

Regulasi terkait disinformasi juga mencakup penegakan kebijakan yang lebih ketat mengenai iklan politik dan manipulasi informasi selama proses pemilu. *Platform* digital harus diharuskan untuk mengungkapkan siapa yang mendanai iklan politik dan memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam iklan tersebut tidak mengandung klaim yang menyesatkan atau tidak dapat dibuktikan. Kebijakan ini sangat penting mengingat peran besar media sosial dalam pemilu, sehingga disinformasi dapat dengan mudah memengaruhi opini pemilih dan hasil pemilu. Dalam hal ini, regulasi *platform* digital dapat mengarah pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan perlindungan yang lebih besar bagi pemilih agar tetap dapat mengakses informasi yang akurat dan tidak bias.

Namun, tantangan utama dalam merancang regulasi *platform* digital adalah menghindari dampak yang berlebihan terhadap kebebasan berbicara. Pengaturan yang terlalu ketat atau sensor yang berlebihan dapat menimbulkan ketakutan akan pembatasan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif antara pemerintah, *platform* digital, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya efektif dalam mengatasi disinformasi, tetapi juga menghormati hak-hak dasar individu. Pendekatan ini dapat melibatkan upaya pendidikan publik untuk meningkatkan literasi media serta promosi transparansi dari pihak

platform dalam hal algoritma yang digunakan untuk mengatur konten.

G. Literasi Digital sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Publik

Literasi digital merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, dan menggunakan teknologi informasi secara efektif dan bertanggung jawab. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin terhubung melalui internet dan perangkat digital, literasi digital bukan hanya menjadi keterampilan teknis, tetapi juga suatu keharusan dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Sebagai contoh, dalam lingkungan yang semakin terkendalikan oleh media digital, kemampuan untuk menyaring informasi yang valid dan menghindari penyebaran disinformasi menjadi sangat penting. Literasi digital membantu individu dalam memahami bagaimana informasi diciptakan, disebar, dan diakses di ruang digital, serta bagaimana menggunakannya untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas.

Salah satu aspek penting dalam literasi digital adalah kemampuan untuk mengevaluasi sumber informasi. Di dunia maya, siapa pun dapat membuat dan menyebarkan konten dengan berbagai tujuan, mulai dari edukasi hingga manipulasi opini publik. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang bagaimana cara mengevaluasi kredibilitas informasi yang diterima, baik itu dari situs web, media sosial, maupun *platform* digital lainnya. Pendidikan literasi digital dapat melibatkan pengajaran tentang pentingnya memverifikasi fakta, memeriksa sumber informasi, dan mengenali ciri-ciri konten yang mengandung bias atau bahkan disinformasi. Pengetahuan ini sangat penting untuk membentuk kesadaran kritis terhadap informasi yang beredar, mengingat bagaimana media sosial dan *platform* digital lainnya sering kali menjadi sumber utama bagi masyarakat dalam memperoleh berita (Lewandowsky et al., 2017).

Literasi digital juga penting dalam meningkatkan kesadaran publik terkait dengan risiko yang ada di dunia digital. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, berbagai risiko digital

seperti pencurian data pribadi, penipuan online, serta eksposur terhadap konten berbahaya semakin meningkat. Untuk itu, literasi digital bukan hanya tentang bagaimana menggunakan perangkat digital, tetapi juga tentang bagaimana melindungi diri dari potensi ancaman yang mungkin timbul. Pengetahuan tentang pengaturan privasi, penggunaan kata sandi yang kuat, dan cara mengenali tanda-tanda *phishing* adalah bagian dari literasi digital yang harus ditanamkan sejak dini.

Di banyak negara, literasi digital telah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan sebagai salah satu komponen utama dalam pembentukan keterampilan abad ke-21. Pengajaran literasi digital kepada siswa memungkinkan mereka untuk menjadi konsumen informasi yang lebih bijaksana, serta produsen konten yang bertanggung jawab. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya literasi digital, masyarakat tidak hanya diberdayakan untuk menghindari jebakan disinformasi, tetapi juga untuk berpartisipasi secara produktif dalam diskursus publik. Hal ini dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman, lebih terinformasi, dan lebih inklusif, sehingga individu dapat bertukar ide, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan cara yang konstruktif.

Namun, tantangan utama dalam implementasi literasi digital adalah ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dan informasi. Di banyak wilayah, terutama di negara berkembang, akses terhadap perangkat digital dan koneksi internet yang stabil masih terbatas. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam tingkat literasi digital antara kelompok masyarakat yang memiliki akses penuh ke teknologi dan yang tidak. Oleh karena itu, program literasi digital perlu disertai dengan upaya untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan, dapat memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya digital. Hal ini mencakup kebijakan publik yang mendukung penyediaan teknologi yang terjangkau dan pelatihan literasi digital yang dapat diakses oleh semua individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial.

Di sisi lain, literasi digital juga berperan dalam mempersiapkan individu untuk berpartisipasi dalam

pemerintahan digital dan proses demokrasi. Pemilu digital, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, serta penyebaran informasi politik secara *online* memerlukan masyarakat yang paham tentang cara mengakses informasi yang valid, memahami proses digital, dan menghindari manipulasi informasi. Oleh karena itu, penguatan literasi digital di kalangan masyarakat sangat berperan dalam memperkuat ketahanan demokrasi di dunia yang semakin terdigitalisasi (Mossberger et al., 2008). Dengan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya literasi digital, masyarakat dapat lebih memahami dampak dari informasi yang diterima dan membuat keputusan yang lebih cerdas dalam berbagai aspek kehidupan.

BAB 5

REGULASI DAN ETIKA DALAM DEMOKRASI DIGITAL

A. Pendahuluan

Regulasi dan etika dalam demokrasi digital mengacu pada seperangkat aturan, prinsip, dan norma yang mengatur penggunaan teknologi digital dalam proses demokrasi. Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara individu berpartisipasi dalam kehidupan politik, mengakses informasi, serta berinteraksi dengan institusi pemerintahan. Regulasi berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta batasan dalam penggunaan teknologi digital guna memastikan keberlanjutan demokrasi yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, etika berperan dalam memberikan pedoman moral terkait perilaku digital yang bertanggung jawab, melindungi kebebasan berekspresi, serta mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan proses demokrasi.

Pemahaman mengenai regulasi dalam demokrasi digital menjadi krusial karena perkembangan teknologi informasi dapat menciptakan tantangan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem hukum konvensional. Undang-undang terkait perlindungan data pribadi, hak atas informasi, serta regulasi konten digital menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan keamanan informasi. Tanpa adanya regulasi yang jelas, penyalahgunaan data, manipulasi opini publik melalui teknologi kecerdasan

buatan, serta penyebaran disinformasi dapat melemahkan legitimasi demokrasi. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum yang adaptif terhadap dinamika digital diperlukan guna memastikan bahwa kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Etika dalam demokrasi digital menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas demokrasi. Norma etis yang diterapkan dalam komunikasi digital dapat mencegah praktik yang merusak, seperti ujaran kebencian, pelecehan daring, serta propaganda politik berbasis manipulasi. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan menjadi pedoman dalam memastikan bahwa penggunaan teknologi digital tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, kesadaran akan etika digital berperan dalam membangun budaya diskusi yang sehat, menghargai perbedaan pendapat, serta mendorong partisipasi publik yang konstruktif dalam proses pengambilan keputusan politik.

Regulasi yang efektif dalam demokrasi digital juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Algoritma media sosial, kecerdasan buatan, serta otomatisasi dalam distribusi informasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap opini publik. Tanpa adanya transparansi dalam pengelolaan teknologi ini, terjadi potensi diskriminasi algoritmik yang dapat mempengaruhi akses terhadap informasi politik yang berimbang. Oleh karena itu, regulasi harus mencakup prinsip keterbukaan dalam penggunaan teknologi digital agar demokrasi tidak dikendalikan oleh kepentingan segelintir entitas yang memiliki kendali atas infrastruktur digital.

Tantangan lain dalam regulasi dan etika demokrasi digital terletak pada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap keamanan serta ketertiban publik. Kebijakan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi serta membatasi ruang publik digital sebagai sarana ekspresi demokratis. Sebaliknya, regulasi yang terlalu longgar dapat membuka celah bagi penyalahgunaan teknologi yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Oleh karena itu, pengembangan regulasi yang berbasis partisipasi, dengan

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, menjadi langkah yang esensial dalam menciptakan sistem demokrasi digital yang berkelanjutan.

Penerapan regulasi dan etika yang kuat dalam demokrasi digital juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam ruang digital, kesadaran akan batasan privasi, serta kemampuan dalam mengenali informasi yang kredibel menjadi faktor utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat. Selain itu, transparansi dalam kebijakan *platform* digital serta akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemilu berbasis teknologi menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa demokrasi digital tetap berjalan secara adil dan inklusif.

B. Kebijakan dan Regulasi Demokrasi Digital di Berbagai Negara

Kebijakan dan regulasi dalam demokrasi digital memegang peranan penting dalam memastikan penggunaan teknologi informasi untuk tujuan demokrasi dapat berjalan secara adil dan transparan. Dengan berkembangnya teknologi digital yang pesat, negara-negara di seluruh dunia perlu menyusun kebijakan yang tidak hanya mendukung transformasi digital tetapi juga menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar, seperti kebebasan berpendapat, privasi, dan partisipasi publik. Setiap negara merespons tantangan ini dengan pendekatan yang berbeda, bergantung pada kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang ada di dalam negeri.

Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, kebijakan dan regulasi demokrasi digital sering kali dipengaruhi oleh upaya untuk mengatur *platform* media sosial dan melindungi hak-hak warga negara di dunia digital. Contohnya, Uni Eropa telah mengimplementasikan *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang sangat ketat, yang mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh perusahaan digital. GDPR bertujuan untuk melindungi privasi individu, mengurangi penyalahgunaan data,

serta memberikan transparansi dalam cara data digunakan untuk kepentingan politik, komersial, atau lainnya. Di sisi lain, Amerika Serikat mengadopsi pendekatan yang lebih berbasis pasar dan kebebasan, sehingga regulasi terhadap perusahaan teknologi lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Dalam konteks ini, upaya regulasi seringkali terfokus pada perlindungan hak-hak konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi dan potensi manipulasi informasi melalui media sosial.

Di negara-negara berkembang, kebijakan demokrasi digital lebih bervariasi dan cenderung lebih fokus pada memastikan bahwa teknologi dapat diakses secara merata di seluruh lapisan masyarakat, serta membangun infrastruktur digital yang memungkinkan partisipasi publik secara luas. Sebagai contoh, di India kebijakan demokrasi digital dilihat dari upaya pemerintah untuk memperluas akses internet melalui berbagai inisiatif, seperti BharatNet, yang bertujuan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan jaringan digital. Selain itu, India juga mengembangkan regulasi terkait keamanan data dan perlindungan privasi, meskipun tantangan utama terletak pada pengawasan negara terhadap aktivitas *online* yang dapat mengancam kebebasan berpendapat.

Pemerintah di negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia cenderung memiliki kebijakan yang lebih ketat dalam mengontrol ruang digital untuk mencegah penyebaran informasi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai negara. Di Tiongkok, terdapat kebijakan yang dikenal dengan istilah "Great Firewall" yang bertujuan untuk membatasi akses terhadap informasi dari luar negeri, serta mengontrol konten yang dapat diakses oleh warga negara. Meskipun demikian, Tiongkok juga aktif memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan melalui platform yang dikelola oleh negara. Hal ini menandakan adanya perbedaan dalam regulasi, sehingga teknologi dapat digunakan untuk tujuan positif dalam demokrasi tetapi juga dapat menjadi alat untuk pengawasan dan kontrol.

Di beberapa negara, kebijakan dan regulasi demokrasi digital berfokus pada penggunaan teknologi dalam meningkatkan transparansi pemerintahan dan memperkuat partisipasi warga negara dalam proses politik. Di Estonia, negara ini telah menerapkan sistem *e-voting* yang memungkinkan warga negara untuk memilih dalam pemilu melalui internet. Estonia juga dikenal dengan kebijakan yang mendukung *e-residency*, yang memungkinkan individu dari luar negeri untuk membuka bisnis digital di negara tersebut tanpa perlu tinggal di Estonia secara fisik. Inisiatif ini memperlihatkan bagaimana negara dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi politik dan mendemokratisasi akses terhadap layanan publik. Keberhasilan sistem ini didorong oleh regulasi yang mengatur keamanan digital secara ketat dan menjamin integritas proses pemilu serta perlindungan data pribadi.

Selain itu, kebijakan dalam demokrasi digital juga berhubungan dengan pengaturan media sosial dan algoritma yang digunakan oleh platform digital untuk menyebarkan informasi. Di Uni Eropa, regulasi seperti *Digital Services Act (DSA)* berupaya untuk mengatasi masalah disinformasi dan memastikan transparansi dalam cara platform digital mengelola konten yang dapat mempengaruhi opini publik dan proses pemilu. DSA mendorong *platform* untuk lebih aktif dalam mengawasi konten yang diunggah oleh penggunanya, sekaligus memberikan lebih banyak hak kepada pengguna untuk mengontrol informasi pribadi yang dibagikan dengan *platform* digital. Regulasi ini mencerminkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani dampak sosial dan politik dari media sosial, yang semakin menjadi bagian integral dalam proses demokrasi di dunia digital.

Secara keseluruhan, kebijakan dan regulasi demokrasi digital di berbagai negara mencerminkan pendekatan yang beragam terhadap penggunaan teknologi dalam kehidupan politik. Di satu sisi, ada negara yang melihat teknologi sebagai alat untuk memperkuat demokrasi dan transparansi, sementara di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi alat untuk memperkuat kontrol

negara dan membatasi kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan dapat menyeimbangkan antara kebebasan individu, keamanan, dan transparansi dalam demokrasi digital.

C. Hak Asasi Manusia dalam Demokrasi Digital

Dalam konteks demokrasi digital, hak asasi manusia (HAM) memainkan peranan penting dalam membentuk interaksi antara individu dan teknologi, serta dalam memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Demokrasi digital menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan partisipasi politik, transparansi pemerintahan, dan akses terhadap informasi. Namun, dalam proses ini, terdapat tantangan terkait dengan perlindungan hak-hak dasar individu, yang harus dipertimbangkan dengan seksama dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Hak asasi manusia dalam dunia digital mencakup berbagai aspek, seperti kebebasan berekspresi, privasi, hak atas data pribadi, dan hak untuk mengakses informasi secara adil dan setara.

Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental dalam demokrasi digital. Penggunaan media sosial dan platform digital lainnya memberikan ruang bagi individu untuk mengemukakan pendapat, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam diskursus publik. Namun, kebebasan ini sering kali terancam oleh penyebaran konten berbahaya atau penyalahgunaan platform untuk tujuan politik atau ekonomi. Negara dan perusahaan teknologi harus menyeimbangkan antara hak untuk berekspresi dengan tanggung jawab untuk mencegah penyebaran disinformasi, kebencian, atau konten yang merugikan. Misalnya, di Uni Eropa, kebijakan seperti *Digital Services Act* (DSA) berupaya untuk mengatasi disinformasi di *platform* digital sambil tetap menghormati kebebasan berekspresi pengguna.

Selain kebebasan berekspresi, hak atas privasi juga menjadi isu penting dalam demokrasi digital. Seiring dengan semakin banyaknya data pribadi yang dikumpulkan oleh platform digital, individu menghadapi risiko pengungkapan informasi pribadi

yang tidak sah atau penyalahgunaan data untuk tujuan komersial atau politik. Dalam banyak negara, regulasi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa berfokus pada perlindungan data pribadi dan privasi pengguna, memberikan hak bagi individu untuk mengontrol informasi pribadi yang dibagikan dengan pihak ketiga. Perlindungan privasi menjadi lebih kompleks di dunia digital, di mana data tidak hanya dikumpulkan secara langsung dari individu, tetapi juga melalui algoritma yang menganalisis perilaku online dan interaksi sosial.

Di sisi lain, hak untuk mengakses informasi secara setara juga merupakan elemen penting dalam demokrasi digital. Dalam dunia yang semakin terhubung, akses terhadap informasi menjadi prasyarat bagi warga negara untuk membuat keputusan yang berinformasi dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial. Tantangannya adalah memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang status ekonomi atau lokasi geografis, memiliki akses yang setara terhadap teknologi digital dan informasi yang disediakan oleh *platform-platform* tersebut. Ketimpangan dalam akses teknologi dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan politik, menghambat kemampuan kelompok tertentu untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi.

Regulasi yang mengatur hak asasi manusia dalam konteks demokrasi digital harus memperhatikan masalah keamanan siber. Keamanan data dan sistem informasi yang digunakan oleh lembaga publik dan *platform* digital untuk mengumpulkan informasi pribadi adalah aspek penting dalam melindungi hak-hak individu. Negara dan organisasi internasional, seperti PBB, telah mengakui bahwa perlindungan hak asasi manusia di dunia digital membutuhkan kerangka hukum yang kuat dan pemantauan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Salah satu tantangan utama dalam hal ini adalah memastikan bahwa teknologi yang digunakan untuk pengawasan atau pemantauan tidak melanggar hak atas privasi dan kebebasan individu.

Selain itu, hak asasi manusia dalam demokrasi digital juga melibatkan pemenuhan hak untuk pendidikan dan pelatihan mengenai literasi digital. Untuk dapat berpartisipasi secara penuh

dalam demokrasi digital, individu perlu memahami bagaimana teknologi berfungsi, bagaimana data dikumpulkan dan digunakan, serta bagaimana melindungi privasi dan keamanan *online*. Pendidikan mengenai hak-hak digital dan perlindungan privasi harus diperkenalkan di tingkat masyarakat, terutama di negara-negara berkembang di mana tingkat literasi digital masih rendah. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko dan hak-hak digital, individu akan lebih mampu membuat keputusan yang bijak dalam berinteraksi dengan teknologi.

Secara keseluruhan, hak asasi manusia dalam demokrasi digital mencakup lebih dari sekadar perlindungan privasi atau kebebasan berekspresi. Hal ini adalah tentang menciptakan ruang sehingga individu dapat berpartisipasi secara bebas dan setara dalam proses politik dan sosial, tanpa rasa takut akan pengawasan yang berlebihan atau pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu. Kebijakan yang efektif dan regulasi yang adil harus memperhatikan semua aspek ini untuk memastikan bahwa dunia digital berfungsi sebagai ruang yang inklusif dan aman bagi semua individu.

D. Perlindungan Privasi dan Data dalam Partisipasi Digital

Partisipasi digital telah menjadi elemen kunci dalam sistem demokrasi modern. Namun, seiring dengan meningkatnya keterlibatan warga negara melalui *platform* digital, perlindungan privasi dan data pribadi menjadi isu yang semakin penting. Pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran data pribadi secara digital memiliki potensi untuk menimbulkan risiko terhadap hak privasi individu, yang dapat berimplikasi pada kebebasan dan keadilan dalam berpartisipasi dalam proses politik dan sosial. Oleh karena itu, pengaturan yang tepat mengenai privasi dan perlindungan data pribadi sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil dalam partisipasi digital.

Pada dasarnya, partisipasi digital mencakup segala bentuk keterlibatan individu dalam ruang digital, baik dalam konteks politik, sosial, maupun ekonomi. Salah satu bentuk partisipasi digital yang umum adalah penggunaan media sosial, forum *online*,

dan aplikasi partisipatif lainnya untuk menyuarakan pendapat, berdebat, atau bahkan menyampaikan petisi politik. Dalam proses ini, data pribadi seperti lokasi, preferensi, aktivitas *online*, dan interaksi sosial dikumpulkan dan dianalisis oleh *platform* digital. Tanpa perlindungan yang memadai, data ini dapat disalahgunakan, mengancam privasi individu, dan bahkan mempengaruhi keputusan politik dan sosial secara tidak adil.

Privasi digital, yang melibatkan perlindungan data pribadi dalam dunia maya, menjadi salah satu perhatian utama dalam partisipasi digital. Sebagai contoh, ketika individu berpartisipasi dalam kampanye politik melalui platform online, informasi pribadi seperti nama, alamat email, dan riwayat interaksi digital dapat dikumpulkan oleh penyedia *platform*. Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyusun profil pengguna yang mendalam, yang memungkinkan penargetan politik dan pemasaran yang lebih terperinci. Tanpa pengaturan yang jelas dan tegas, informasi ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersial atau bahkan dimanipulasi dalam upaya memengaruhi opini publik, yang dapat merusak integritas proses demokrasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, sejumlah negara telah mengembangkan regulasi yang bertujuan melindungi privasi data pribadi dalam konteks partisipasi digital. Salah satu regulasi yang paling terkenal adalah *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang diberlakukan di Uni Eropa pada tahun 2018. GDPR menetapkan sejumlah hak bagi individu terkait pengumpulan dan penggunaan data pribadi, termasuk hak untuk meminta akses terhadap data yang dikumpulkan, hak untuk mengoreksi data yang salah, dan hak untuk menghapus data (hak untuk dilupakan). Regulasi ini berupaya memberikan kontrol yang lebih besar kepada individu atas data pribadi, serta mewajibkan perusahaan untuk menjaga transparansi mengenai cara data dikumpulkan dan digunakan.

Di luar Uni Eropa, negara-negara lain juga mulai memperkenalkan kebijakan perlindungan data pribadi yang serupa, meskipun penerapannya bervariasi. Beberapa negara, seperti Brasil dengan undang-undang LGPD (*Lei Geral de Proteção*

de Dados), mengambil langkah-langkah untuk mengatur pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan privasi warganya dalam era digital. Negara-negara ini mengakui pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam proses digital tanpa takut akan penyalahgunaan informasi pribadi mereka.

Perlindungan data pribadi dalam partisipasi digital tidak hanya terbatas pada regulasi yang berlaku, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi di dunia maya. Literasi digital memainkan peran penting dalam menciptakan kesadaran tentang hak-hak individu atas data pribadi mereka. Pendidikan mengenai cara melindungi informasi pribadi, mengenali potensi risiko di dunia digital, dan memahami mekanisme pengumpulan data dapat memberdayakan individu untuk mengambil keputusan yang lebih bijak dalam berpartisipasi dalam kegiatan digital. Namun, meskipun kebijakan perlindungan data pribadi telah diperkenalkan, tantangan yang masih ada terkait dengan teknologi yang terus berkembang dan semakin kompleks. Contohnya, teknologi pengumpulan data yang lebih canggih, seperti pengenalan wajah dan pelacakan lokasi secara *real-time*, semakin mengaburkan batas antara data pribadi yang dapat diakses dan data yang harus dilindungi. Dalam hal ini, pendekatan yang lebih holistik dan dinamis diperlukan untuk menjamin bahwa regulasi yang ada tetap relevan dan dapat melindungi hak-hak individu seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat.

Selain itu, kepercayaan publik terhadap *platform* digital juga merupakan faktor kunci dalam memastikan partisipasi yang adil dan aman dalam ekosistem digital. Jika individu merasa bahwa data pribadi mereka rentan terhadap penyalahgunaan atau bahwa *platform* digital tidak cukup transparan dalam pengelolaan data, maka partisipasi digital dapat menurun. Oleh karena itu, transparansi yang lebih besar mengenai kebijakan privasi dan praktik pengumpulan data oleh perusahaan teknologi menjadi

langkah penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan partisipasi yang lebih luas dan beragam dalam proses demokrasi digital.

Dalam konteks ini, perlindungan privasi dan data dalam partisipasi digital tidak hanya melibatkan pembentukan regulasi yang ketat, tetapi juga membutuhkan upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan adil bagi semua pihak. Melalui kebijakan yang proaktif, edukasi yang efektif, dan pengawasan yang ketat, perlindungan terhadap privasi dan data pribadi dapat menjadi landasan yang kuat bagi perkembangan partisipasi digital yang lebih inklusif dan transparan.

F. Etika Berinternet dalam Ruang Demokrasi Digital

Etika berinternet merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi digital. Sebagai ruang yang menghubungkan individu, kelompok, dan institusi dalam berbagi informasi, ruang digital memberikan peluang yang besar untuk partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Namun, seiring dengan semakin berkembangnya *platform* digital, isu etika berinternet muncul sebagai tantangan yang signifikan. Etika berinternet di dalam ruang demokrasi digital berkaitan dengan cara individu dan kelompok berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi di dunia maya, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dasar demokrasi, seperti kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Salah satu dimensi etika berinternet dalam ruang demokrasi digital adalah bagaimana pengguna *platform* digital menghormati kebebasan berekspresi sambil menjaga ruang diskusi yang sehat dan bebas dari ujaran kebencian. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar demokrasi, termasuk dalam dunia digital. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Sebagai contoh, konten yang mengandung kebencian, diskriminasi, atau kekerasan bisa merusak tatanan sosial dan mengganggu terciptanya dialog yang konstruktif. Oleh karena itu, etika berinternet dalam

konteks demokrasi digital mencakup kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kewajiban untuk tidak menyebarkan konten yang merugikan orang lain atau merusak nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, isu penting lain yang berkaitan dengan etika berinternet adalah verifikasi informasi. Dengan mudahnya informasi dapat disebarkan melalui media sosial dan *platform* digital lainnya, tantangan besar muncul dalam menjaga kebenaran informasi yang beredar. Hoaks, misinformasi, dan disinformasi sering kali menjadi penyebar ketidakpastian dan polarisasi dalam masyarakat. Sebagai elemen penting dalam demokrasi, informasi yang akurat dan dapat dipercaya sangat dibutuhkan oleh publik untuk membuat keputusan yang tepat dalam konteks politik dan sosial. Etika berinternet dalam hal ini mengharuskan individu untuk bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi dan selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya lebih lanjut.

Verifikasi informasi tidak hanya melibatkan tanggung jawab individu, tetapi juga peran besar yang dimiliki oleh *platform* digital dan penyedia layanan internet dalam menjaga etika informasi. Media sosial dan situs web berita memiliki pengaruh besar terhadap informasi yang diterima oleh masyarakat, dan karena itu, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan atau disebarkan tidak bersifat menyesatkan atau merugikan. Beberapa *platform* besar telah memperkenalkan kebijakan untuk memerangi hoaks dan disinformasi, seperti menandai konten yang berpotensi salah atau memblokir akun yang terlibat dalam penyebaran informasi palsu. Meskipun demikian, banyak tantangan yang masih harus dihadapi dalam menanggulangi masalah ini, terutama dalam hal transparansi algoritma dan otoritas dalam menentukan konten yang sah atau tidak sah.

Selain itu, etika berinternet dalam demokrasi digital juga mencakup penghormatan terhadap hak privasi pengguna. Dalam ruang digital, data pribadi sering kali menjadi komoditas yang diperdagangkan atau digunakan tanpa sepengetahuan atau

persetujuan individu. Penggunaan data pribadi untuk keperluan politik, seperti penargetan iklan politik atau penyebaran informasi yang bias, dapat merusak integritas proses demokrasi. Dalam hal ini, etika berinternet mengharuskan penyedia *platform* untuk mengutamakan keamanan data pengguna dan memastikan bahwa data digunakan dengan cara yang sah dan transparan.

Penghormatan terhadap perbedaan adalah elemen etika lainnya dalam ruang demokrasi digital. Dunia digital, dengan keragaman budaya dan identitasnya, menawarkan kesempatan bagi berbagai kelompok untuk mengekspresikan pendapat dan aspirasi. Namun, pluralitas ini juga dapat menyebabkan polarisasi, terutama jika ruang digital digunakan untuk memperburuk perbedaan atau memicu konflik sosial. Etika berinternet mengharuskan setiap pengguna untuk menjaga sikap saling menghormati, terlepas dari perbedaan pandangan politik, agama, atau budaya, sehingga ruang demokrasi digital tetap terbuka dan inklusif bagi semua pihak.

Selain itu, peran otoritas dan kebijakan publik dalam membentuk etika berinternet sangatlah penting. Pemerintah dan badan regulasi memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan menegakkan aturan yang mendukung etika berinternet. Regulasinya meliputi pengaturan mengenai konten yang berbahaya, perlindungan data pribadi, serta pencegahan penyalahgunaan teknologi digital dalam ruang politik dan sosial. Pengawasan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pendidikan literasi digital juga memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran dan pemahaman etika berinternet. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara menggunakan internet secara etis akan lebih mampu menavigasi tantangan yang muncul dalam dunia maya. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam menggunakan alat digital, tetapi juga pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam dunia digital, termasuk cara menjaga privasi, berpartisipasi dalam

diskusi yang sehat, serta mengenali dan menghindari penyebaran informasi palsu.

Secara keseluruhan, etika berinternet dalam ruang demokrasi digital berfokus pada pemeliharaan nilai-nilai dasar demokrasi, seperti kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan integritas informasi. Tantangan yang muncul dalam menjaga etika berinternet di ruang digital sangat kompleks, mengingat perkembangan teknologi yang pesat dan globalisasi dunia maya. Oleh karena itu, kesadaran bersama antara individu, perusahaan teknologi, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang etis dan mendukung proses demokrasi yang sehat dan adil.

H. Perlindungan Hak Digital dan Kebebasan Berpendapat

Perlindungan hak digital merupakan aspek penting dalam menjamin kebebasan individu untuk mengakses, menggunakan, dan berpartisipasi dalam dunia digital tanpa adanya pembatasan yang tidak sah. Di era digital, di mana aktivitas manusia semakin terhubung melalui *platform-platform* online, hak digital meliputi berbagai hal, mulai dari akses terhadap informasi, privasi data, hingga kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat, yang merupakan hak asasi manusia yang fundamental, berperan sangat penting dalam memastikan bahwa individu dapat mengekspresikan pandangan, ide, dan opini tanpa takut akan pembalasan atau pembatasan yang tidak sah.

Salah satu dimensi utama dari perlindungan hak digital adalah privasi dan keamanan data pribadi. Dalam dunia digital, data pribadi sering kali menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan atau dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penting untuk adanya kebijakan dan regulasi yang memastikan bahwa data pribadi dijaga dengan baik dan digunakan secara transparan serta etis. Undang-undang seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa memberikan contoh regulasi yang memprioritaskan perlindungan hak digital dalam bentuk perlindungan terhadap data pribadi individu. Dalam konteks ini, hak untuk mengontrol

data pribadi dan hak untuk mengetahui bagaimana data tersebut digunakan merupakan bagian dari hak digital yang mendasar (Binns, 2018).

Selain privasi, kebebasan berpendapat juga menjadi salah satu hak digital yang perlu dilindungi dalam ruang digital. Kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kebebasan ini memberikan individu hak untuk menyuarakan pendapat, baik secara pribadi maupun kolektif, tanpa takut akan ancaman atau pembalasan dari pihak mana pun. Dalam konteks digital, kebebasan berpendapat dapat dipraktikkan melalui media sosial, forum online, blog, dan *platform* digital lainnya yang memungkinkan interaksi antar individu dari berbagai latar belakang.

Namun, meskipun kebebasan berpendapat merupakan hak dasar, ada batasan-batasan yang perlu diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut, seperti penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan disinformasi. Oleh karena itu, dalam menjaga kebebasan berpendapat di dunia digital, diperlukan peraturan yang seimbang antara kebebasan individu untuk mengemukakan pendapat dan perlindungan terhadap individu lain dari ancaman atau konten yang berbahaya. Contohnya, undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian di platform digital sering kali bertujuan untuk menanggulangi konten yang dapat merusak hubungan sosial atau mengancam keselamatan publik. Penerapan kebijakan yang jelas mengenai konten yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan di platform online menjadi salah satu cara untuk melindungi kebebasan berpendapat dalam konteks yang lebih aman dan bertanggung jawab (Gillespie, 2018).

Selain itu, dengan semakin berkembangnya teknologi dan algoritma yang digunakan oleh *platform* digital, masalah baru muncul terkait dengan kendali atas informasi yang dikonsumsi oleh pengguna. Algoritma yang digunakan oleh platform digital dapat mempengaruhi apa yang dilihat dan diakses oleh pengguna,

sehingga berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dengan mengutamakan informasi tertentu dan menyembunyikan informasi lainnya. Dalam konteks ini, transparansi algoritma dan upaya untuk mengurangi bias algoritmik menjadi isu yang semakin penting dalam memastikan perlindungan hak digital dan kebebasan berpendapat. Perlindungan hak digital tidak hanya melibatkan hak untuk berbicara atau menulis, tetapi juga hak untuk mengakses informasi secara bebas dan tanpa intervensi yang berlebihan dari pihak ketiga, seperti perusahaan teknologi atau pemerintah.

Perlindungan hak digital dan kebebasan berpendapat juga terkait erat dengan peran negara dalam menciptakan kerangka hukum yang menjamin hak-hak tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa undang-undang dan regulasi yang ada memberikan perlindungan yang memadai terhadap individu di ruang digital. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak untuk berpartisipasi dalam diskusi publik dan kebebasan untuk mengungkapkan pandangan pribadi tanpa ancaman atau tekanan. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari potensi pelanggaran hak digital yang dilakukan oleh pihak swasta, seperti penyalahgunaan data pribadi atau sensor terhadap konten yang sah.

Namun, tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hak-hak digital juga sangat kompleks. Contohnya, dalam upaya untuk mengurangi penyebaran hoaks dan disinformasi, beberapa platform digital mungkin terpaksa menerapkan kebijakan sensor yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati untuk menjaga agar kebijakan perlindungan data dan kebebasan berpendapat tidak tumpang tindih atau saling bertentangan. Secara keseluruhan, perlindungan hak digital dan kebebasan berpendapat di dunia digital merupakan komponen penting dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Penciptaan kerangka hukum yang adil dan transparan, yang mampu melindungi hak-hak individu di ruang digital, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak digital

tetap terjaga, sementara kebebasan berpendapat dapat diterapkan secara sehat dan produktif.

H. Peran Lembaga Pemerintah dalam Mengawasi Demokrasi Digital

Lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan demokrasi digital, terutama terkait dengan kebijakan, regulasi, dan pengawasan terhadap aktivitas di ruang digital. Demokrasi digital berhubungan langsung dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung partisipasi politik, akses informasi, dan kebebasan berpendapat secara *online*. Dalam konteks ini, lembaga pemerintah berfungsi untuk memastikan bahwa platform digital beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak melanggar hak-hak individu atau memperburuk ketimpangan sosial. Tanggung jawab pengawasan ini meliputi berbagai aspek, seperti perlindungan data pribadi, kebebasan berbicara, transparansi *platform* digital, dan penanggulangan disinformasi.

Salah satu peran utama lembaga pemerintah adalah menetapkan regulasi yang dapat menjaga agar ruang digital tetap terbuka dan aman untuk seluruh warga negara. Regulasi ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan teknologi dan platform digital tidak menyalahgunakan kekuatan mereka dalam mengendalikan informasi atau menyebarkan konten yang merugikan masyarakat. Sebagai contoh, di Uni Eropa, penerapan *General Data Protection Regulation* (GDPR) bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi individu dan memastikan transparansi dalam penggunaan data oleh perusahaan teknologi. Dengan adanya regulasi semacam ini, lembaga pemerintah berperan dalam memastikan bahwa data pribadi tidak dieksploitasi tanpa persetujuan yang jelas dari pemiliknya. Selain itu, regulasi yang mengatur tentang kebebasan berbicara dan penanggulangan ujaran kebencian juga menjadi bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan terhadap masyarakat.

Lembaga pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberagaman dan keterbukaan dalam penyebaran informasi melalui *platform* digital. Di banyak negara, lembaga pemerintah bekerja untuk mencegah monopoli dalam ruang digital yang dapat membatasi keberagaman pandangan politik dan sosial. Contohnya, melalui badan pengatur komunikasi dan media, pemerintah dapat mengawasi bagaimana konten disajikan di *platform* media sosial dan memastikannya tidak mendistorsi informasi dengan cara yang dapat merugikan publik. Hal ini termasuk memastikan bahwa *platform* digital memberikan ruang yang adil bagi semua suara dan menghindari penyebaran informasi yang memecah belah masyarakat atau merusak integritas sistem pemilu.

Selain regulasi, lembaga pemerintah juga berperan dalam mendidik publik mengenai hak-hak digital dan kewajiban yang ada di dunia maya. Program-program literasi digital yang diselenggarakan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara aman dan efektif menggunakan internet, serta mengenali potensi bahaya seperti disinformasi, hoaks, dan penipuan daring. Melalui pendidikan digital yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam berpartisipasi dalam demokrasi digital tanpa terjebak dalam konten yang salah atau berbahaya.

Lembaga pemerintah juga berperan penting dalam mengawasi praktik-praktik manipulasi informasi, seperti disinformasi dan hoaks, yang dapat merusak sistem demokrasi digital. Negara-negara di seluruh dunia menghadapi tantangan besar terkait dengan penyebaran informasi yang salah di *platform* digital, terutama saat menjelang pemilu atau peristiwa politik penting. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang dapat mendeteksi dan mengatasi disinformasi tanpa membatasi kebebasan berpendapat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan *platform* teknologi untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang tidak akurat atau berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik.

Di sisi lain, penting juga untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan ini tidak disalahgunakan untuk membatasi suara-suara oposisi atau menekan kebebasan berekspresi (Gillespie, 2018).

Secara keseluruhan, lembaga pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar demokrasi digital dapat berjalan dengan transparan, adil, dan inklusif. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga untuk memastikan bahwa *platform* digital mendukung nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, dan keberagaman. Regulasi yang tepat dan kebijakan yang bijaksana dapat memberikan fondasi yang kuat bagi sistem demokrasi yang sehat di era digital ini.

BAB 6

DAMPAK DEMOKRASI DIGITAL BAGI KEWARGAAN DAN PEMERINTAHAN

A. Pendahuluan

Dampak demokrasi digital bagi kewargaan dan pemerintahan mencerminkan perubahan yang terjadi dalam partisipasi politik, transparansi, serta proses pengambilan keputusan akibat pemanfaatan teknologi digital. Perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan sistem politik secara lebih aktif. Akses terhadap informasi yang lebih luas dan cepat memungkinkan individu untuk memahami isu-isu politik dengan lebih mendalam serta berkontribusi dalam proses demokrasi melalui berbagai platform digital. Teknologi digital juga menciptakan saluran komunikasi yang lebih efisien antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan publik dapat dirancang berdasarkan aspirasi yang lebih inklusif.

Penerapan demokrasi digital meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Ruang diskusi daring, jajak pendapat digital, serta platform petisi daring memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat serta menuntut akuntabilitas dari pihak yang berwenang. Digitalisasi dalam sistem demokrasi juga mendorong partisipasi politik yang lebih luas, termasuk bagi kelompok yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses terhadap proses demokrasi konvensional. Dengan adanya teknologi digital, batasan geografis dan hambatan administratif dapat dikurangi,

sehingga semakin banyak individu yang dapat terlibat dalam pemilu, konsultasi kebijakan, serta berbagai bentuk interaksi politik lainnya.

Transparansi pemerintahan menjadi salah satu aspek penting dalam demokrasi digital. Teknologi memungkinkan informasi terkait kebijakan publik, pengelolaan anggaran, serta keputusan politik untuk dapat diakses secara lebih terbuka. Mekanisme digital seperti *open data*, sistem *e-government*, serta penggunaan *blockchain* dalam administrasi publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Keberadaan *platform* digital juga mendukung pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah, sehingga potensi praktik korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Dengan meningkatnya transparansi, legitimasi pemerintahan dapat diperkuat, yang pada akhirnya mendorong stabilitas dalam sistem politik.

Perubahan dalam pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi aspek lain yang dipengaruhi oleh demokrasi digital. Media sosial, aplikasi layanan publik berbasis digital, serta kanal komunikasi daring lainnya memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan langsung. Pemerintah dapat menyampaikan kebijakan serta informasi publik secara lebih efektif, sementara masyarakat dapat memberikan umpan balik serta aspirasi tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang kompleks. Teknologi kecerdasan buatan serta analisis data besar juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk memahami kebutuhan masyarakat dengan lebih akurat, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih sesuai dengan kondisi sosial yang ada.

Selain memberikan manfaat, demokrasi digital juga membawa tantangan yang perlu dihadapi baik oleh masyarakat maupun pemerintahan. Penyebaran informasi yang begitu cepat dalam lingkungan digital dapat meningkatkan risiko disinformasi dan manipulasi opini publik. Berbagai aktor dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan narasi yang tidak berbasis fakta, yang berpotensi mempengaruhi keputusan politik individu serta menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Pemerintah

menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa informasi yang beredar di ruang digital tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa melanggar prinsip kebebasan berekspresi yang menjadi fondasi utama demokrasi.

Keamanan data menjadi isu lain yang muncul dalam demokrasi digital. Penggunaan teknologi digital dalam sistem pemilu, layanan administrasi publik, serta partisipasi politik daring menuntut perlindungan data pribadi yang ketat. Risiko peretasan, pencurian identitas, serta penyalahgunaan informasi pribadi dapat menghambat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi digital. Regulasi yang kuat serta kebijakan perlindungan data yang transparan menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem demokrasi digital dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan.

Dinamika demokrasi digital juga membawa perubahan dalam mekanisme pemerintahan. Sistem pengambilan keputusan berbasis digital memungkinkan proses yang lebih efisien, namun sekaligus menuntut kapasitas teknologi yang mumpuni serta kesiapan sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola teknologi tersebut. Pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur digital yang andal serta memastikan bahwa kebijakan digital yang diterapkan tidak hanya mencerminkan efisiensi administratif, tetapi juga tetap mempertimbangkan prinsip inklusivitas, keadilan, serta keterbukaan dalam proses demokrasi.

B. Transformasi Kebijakan Publik dalam Era Digital

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk kebijakan publik. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan pemerintah untuk mendesain kebijakan yang lebih responsif, transparan, dan berbasis data. Transformasi kebijakan publik dalam konteks digital tidak hanya melibatkan penerapan teknologi dalam proses pembuatan kebijakan, tetapi juga mencakup perubahan paradigma dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola layanan publik.

Salah satu perubahan penting dalam transformasi kebijakan publik adalah pemanfaatan *big data* dalam pembuatan keputusan. Dengan kemajuan teknologi pengumpulan dan analisis data, pemerintah kini memiliki kemampuan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai kebutuhan dan perilaku masyarakat. Data yang dihasilkan dari berbagai sumber, seperti sensor digital, media sosial, dan transaksi elektronik, dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih akurat dan berbasis bukti. Contoh penerapan ini dapat dilihat pada penggunaan data *real-time* untuk merespons kondisi darurat, seperti bencana alam, dengan memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada publik, serta mengoptimalkan distribusi bantuan.

Selain itu, teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. *Platform* digital, seperti aplikasi *e-government* dan media sosial, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, atau berpartisipasi langsung dalam konsultasi publik. Hal ini menciptakan model pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat. Penerapan sistem partisipatif semacam ini dapat dilihat pada beberapa negara yang telah memanfaatkan *platform* digital untuk melibatkan warga negara dalam proses legislasi atau perencanaan Pembangunan.

Peningkatan transparansi juga menjadi salah satu dampak dari transformasi kebijakan publik di era digital. Dengan adanya *platform* digital yang memungkinkan akses langsung ke informasi pemerintah, seperti anggaran negara, peraturan perundang-undangan, dan proyek pembangunan, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan memantau kebijakan yang dijalankan. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari (Bertot et al., 2010).

Di sisi lain, transformasi kebijakan publik juga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan

keamanan siber. Dalam era digital, data pribadi menjadi aset berharga, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kebijakan publik di era digital harus memastikan adanya perlindungan terhadap data pribadi masyarakat dan mencegah potensi pelanggaran privasi. Sebagai contoh, dengan menerapkan regulasi yang ketat mengenai penggunaan dan perlindungan data pribadi, serta menetapkan standar keamanan yang tinggi dalam setiap transaksi digital yang melibatkan data sensitif (Tufekci, 2014).

Transformasi kebijakan publik juga mendorong perubahan dalam cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat. Layanan publik yang dahulu dilakukan secara konvensional kini dapat diakses melalui aplikasi atau platform online, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan dengan lebih mudah dan efisien. Dari pengajuan izin, pembayaran pajak, hingga pendaftaran untuk berbagai layanan publik, semuanya dapat dilakukan secara digital, mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi. Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga mengurangi biaya administrasi bagi pemerintah.

Namun, dalam implementasinya, transformasi kebijakan publik ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas pemerintah dalam hal infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang TIK. Tanpa dukungan yang memadai dalam hal infrastruktur dan keterampilan digital, penerapan kebijakan berbasis teknologi mungkin tidak dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur digital guna memastikan bahwa kebijakan publik dapat terlaksana dengan optimal di era digital ini.

Dengan demikian, transformasi kebijakan publik dalam era digital bukan hanya soal penerapan teknologi baru, tetapi juga melibatkan perubahan mendasar dalam cara pemerintah merespons kebutuhan masyarakat, memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan, serta mengelola transparansi dan

partisipasi publik. Transformasi ini memungkinkan terciptanya pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan zaman.

C. **Demokrasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan**

Demokrasi digital mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperkuat sistem demokrasi, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari warga negara dalam pengambilan keputusan politik, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, teknologi bukan hanya menjadi alat untuk mempercepat proses administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan publik (Norris, 2001).

Penerapan demokrasi digital menawarkan kemungkinan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif. Dengan memanfaatkan platform digital, warga negara dapat lebih mudah mengakses informasi tentang kebijakan publik, menyampaikan masukan, atau berpartisipasi dalam diskusi publik mengenai isu-isu penting. Hal ini dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah karena adanya umpan balik yang lebih cepat dan lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, demokrasi digital memiliki potensi untuk memperkuat partisipasi politik dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dalam setiap proses pembuatan kebijakan.

Salah satu fitur utama dari demokrasi digital adalah penggunaan *e-government*, yang memungkinkan berbagai layanan publik dilakukan secara online. *E-government* merupakan transformasi dari administrasi publik tradisional ke model yang berbasis teknologi digital, yang memungkinkan akses lebih cepat, efisien, dan transparan terhadap layanan pemerintah. Sistem ini memungkinkan warga negara untuk mengakses informasi terkait kebijakan dan program pemerintah, mengajukan permohonan administrasi, serta melakukan transaksi secara elektronik,

mengurangi ketergantungan pada prosedur birokrasi yang lambat dan kompleks. Proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi publik, tetapi juga memberi kesempatan bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Namun, dalam konteks tata kelola pemerintahan, demokrasi digital juga menghadirkan tantangan besar terkait privasi dan keamanan data. Setiap transaksi digital yang melibatkan informasi pribadi warga negara dapat berisiko jika tidak dikelola dengan standar keamanan yang tepat. Oleh karena itu, regulasi yang ketat tentang perlindungan data pribadi dan penyimpanan informasi menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan digital. Perlindungan data yang lemah dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi pribadi, yang dapat merusak kredibilitas pemerintah dalam mengelola layanan publik (Tufekci, 2014).

Selain itu, demokrasi digital juga berpotensi memperburuk kesenjangan digital yang ada antara berbagai kelompok masyarakat. Akses terhadap teknologi dan keterampilan digital yang tidak merata dapat menyebabkan sebagian kelompok tidak dapat memanfaatkan layanan digital yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam implementasi demokrasi digital, penting untuk memperhatikan kesenjangan digital ini dan merancang kebijakan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan akses yang lebih luas terhadap teknologi bagi kelompok yang lebih rentan atau terpinggirkan, guna memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses partisipasi politik dan pemerintahan (van Dijk, 2023).

Dalam hal tata kelola pemerintahan, demokrasi digital juga menuntut adanya perubahan dalam pola pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan data besar (*big data*) dan analitik canggih, pemerintah dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai perilaku, preferensi, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini memungkinkan pembuatan kebijakan yang lebih berbasis bukti dan responsif terhadap perubahan sosial yang cepat. Sebagai

contoh, dalam situasi krisis atau bencana alam, analisis data secara *real-time* dapat membantu pemerintah untuk merespons dengan cepat dan efektif, serta mendistribusikan bantuan ke wilayah yang paling membutuhkan.

Demokrasi digital juga membuka peluang untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan. Dengan adanya *platform* yang memungkinkan publik untuk memantau proses kebijakan dan pengelolaan anggaran, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi penggunaan dana publik dan memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara efisien dan akuntabel. Proses ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi potensi korupsi, karena pengawasan publik yang lebih intensif dapat mengurangi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan (Bertot et al., 2010).

Namun, perubahan dalam tata kelola pemerintahan yang disebabkan oleh demokrasi digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan perubahan budaya dalam pemerintahannya. Pemerintah harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan mengembangkan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan saat ini, tetapi juga fleksibel terhadap perubahan di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sebuah kebijakan yang dapat memfasilitasi inovasi dan penerapan teknologi terbaru di sektor publik, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan.

Demokrasi digital, melalui penerapan *e-government* dan *platform* digital lainnya, memiliki potensi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, agar sistem ini efektif, penting untuk memperhatikan aspek perlindungan data, kesenjangan digital, dan perubahan budaya dalam pemerintahan. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, demokrasi digital dapat memberikan manfaat maksimal bagi pengelolaan pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

D. Pengaruh Demokrasi Digital terhadap Kepercayaan Publik

Demokrasi digital merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan partisipasi politik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, demokrasi digital memiliki potensi yang besar untuk memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Kepercayaan publik dalam sistem demokrasi menjadi elemen penting untuk keberlangsungan dan efektivitas tata kelola pemerintahan, karena masyarakat yang percaya pada proses demokrasi cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik dan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Di sisi lain, rendahnya kepercayaan publik dapat merusak integritas institusi dan mengurangi efektivitas kebijakan yang diimplementasikan.

Penggunaan *platform* digital dalam pemerintahan dapat meningkatkan keterlibatan publik dalam proses politik. Melalui berbagai aplikasi digital, seperti e-participation dan *e-voting*, warga negara memiliki akses yang lebih besar untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Partisipasi yang lebih luas ini menciptakan perasaan keterlibatan dan keterhubungan antara warga negara dan pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai, tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintahan cenderung meningkat.

Namun, pengaruh demokrasi digital terhadap kepercayaan publik tidak selalu bersifat positif. Meskipun teknologi memberikan kemudahan dalam akses informasi dan partisipasi politik, adanya potensi penyalahgunaan teknologi, seperti penyebaran informasi palsu (*fake news*) atau manipulasi opini publik, dapat merusak kepercayaan publik. Konten yang tidak akurat atau bias yang beredar di platform digital dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kebenaran informasi yang diberikan oleh pemerintah, sehingga menurunkan tingkat

kepercayaan terhadap institusi negara. Informasi yang salah atau menyesatkan dapat memperburuk polarisasi sosial dan menghambat dialog konstruktif antara pemerintah dan warga negara.

Selain itu, demokrasi digital juga menuntut pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan informasi dan data publik. Melalui penggunaan teknologi digital, data pemerintah, termasuk anggaran negara, kebijakan, dan kinerja, dapat diakses oleh publik secara lebih luas. Keberadaan informasi yang lebih terbuka dapat meningkatkan kepercayaan publik karena masyarakat dapat melihat bagaimana pemerintah menggunakan sumber daya negara. Sebaliknya, kurangnya transparansi atau pengelolaan data yang tidak akurat dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik, terutama jika ada kesan bahwa informasi tersebut disembunyikan atau dipelintir untuk kepentingan tertentu (Bertot et al., 2010).

Aspek lain yang mempengaruhi kepercayaan publik dalam demokrasi digital adalah isu privasi dan keamanan data. Dalam era digital, di mana banyak informasi pribadi dikumpulkan dan diproses oleh berbagai platform pemerintah, warga negara memiliki kekhawatiran tentang bagaimana data pribadi yang dikelola. Jika kebijakan perlindungan data tidak memadai atau terdapat pelanggaran privasi, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat menurun secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa ada perlindungan yang memadai terhadap data pribadi, serta kebijakan yang jelas mengenai penggunaan data tersebut untuk keperluan pemerintahan (Tufekci, 2014). Ketika warga negara merasa bahwa data pribadi aman dan digunakan dengan cara yang etis, kepercayaan terhadap sistem digital pemerintah akan meningkat.

Demokrasi digital juga membawa tantangan terkait ketidaksetaraan akses teknologi. Meskipun teknologi dapat membuka peluang bagi lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, ketidakmerataan akses terhadap perangkat digital dan koneksi internet dapat menciptakan jurang

kesenjangan digital. Kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses atau keterampilan digital yang memadai mungkin terpinggirkan dalam proses partisipasi, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan terhadap sistem demokrasi digital. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital ini melalui kebijakan yang memperluas akses dan literasi digital, guna memastikan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi secara adil dalam proses demokrasi digital (van Dijk, 2023).

Selain tantangan-tantangan yang disebutkan, demokrasi digital berpotensi memperburuk polarisasi politik jika tidak dikelola dengan baik. Algoritma media sosial, sering kali mendorong penggunaannya untuk terpapar pada konten yang sesuai dengan pandangan dan preferensi yang sudah ada, menciptakan ruang gema (*echo chambers*). Fenomena ini dapat memperburuk ketegangan sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang dianggap tidak objektif atau tidak mampu merangkul seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, penerapan demokrasi digital harus memperhatikan keberagaman perspektif dan memastikan bahwa dialog publik yang sehat tetap terjaga dalam ruang digital.

Demokrasi digital, jika diterapkan dengan bijak, dapat memperkuat kepercayaan publik melalui peningkatan transparansi, partisipasi, dan keterlibatan warga negara. Namun, untuk mencapai hasil yang positif, penting bagi pemerintah untuk mengatasi tantangan terkait penyalahgunaan informasi, privasi, ketidaksetaraan akses, dan polarisasi politik. Hanya dengan upaya yang hati-hati dan terkoordinasi, demokrasi digital dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

E. *E-Government* dan Transparansi dalam Administrasi Publik

E-government, atau pemerintahan elektronik, merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan

partisipasi publik dalam proses administrasi. Pengembangan sistem *e-government* telah menjadi pilar penting dalam modernisasi administrasi publik di banyak negara. Teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola informasi secara lebih efektif, memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan warga negara, serta menyederhanakan proses-proses administratif yang sebelumnya rumit dan memakan waktu. Salah satu elemen utama dari *e-government* adalah peningkatan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, yang dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan (Dunleavy et al., 2006).

Transparansi dalam administrasi publik mengacu pada sejauh mana pemerintah terbuka mengenai informasi yang berkaitan dengan kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan sumber daya publik. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat menyediakan data dan informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kebijakan publik diterapkan dan bagaimana anggaran negara dibelanjakan. Dalam konteks *e-government*, transparansi tidak hanya melibatkan penyediaan informasi yang relevan, tetapi juga mencakup interaksi yang lebih terbuka antara pemerintah dan warga negara dalam hal pengambilan keputusan, *feedback* publik, serta pelaporan hasil kebijakan.

Penggunaan teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk menyediakan *platform* yang memungkinkan akses langsung ke informasi publik. Contohnya, website pemerintah yang menyediakan data terkait anggaran, peraturan, serta kebijakan publik yang sedang berjalan, dapat diakses oleh masyarakat tanpa hambatan geografis atau waktu. Hal ini meningkatkan tingkat keterlibatan warga negara dalam proses pemerintahan, karena mereka dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan untuk memahami kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Proses ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mempercepat proses pemberian informasi yang sebelumnya memerlukan waktu yang lebih lama melalui

metode konvensional seperti pengiriman surat atau penyebaran laporan cetak.

Selain itu, *e-government* berpotensi meningkatkan efisiensi pemerintahan. Proses administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual atau menggunakan sistem konvensional dapat dipercepat dan disederhanakan melalui platform digital. Contohnya, pengajuan izin atau layanan publik lainnya yang sebelumnya memerlukan banyak dokumen fisik dan antrian dapat dilakukan secara online. Hal ini tidak hanya mengurangi beban administrasi, tetapi juga memungkinkan warga negara untuk memperoleh layanan dengan lebih cepat dan transparan. Sebagai contoh, *e-Government* dalam bentuk *e-voting* memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilu dengan cara yang lebih efisien dan aman. Proses yang lebih terotomatisasi dan transparan ini dapat mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam administrasi publik.

Namun, implementasi *e-government* juga menuntut adanya kebijakan yang tepat dalam pengelolaan data. Data yang dikumpulkan dalam sistem *e-government*, terutama data pribadi atau sensitif, harus dikelola dengan hati-hati untuk melindungi privasi individu. Tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai penggunaan data pribadi, potensi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan informasi menjadi ancaman bagi terciptanya transparansi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk memastikan transparansi yang berkelanjutan, penting bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan perlindungan data yang kuat dan memastikan bahwa data yang dikelola tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan publik.

E-government juga menghadirkan tantangan baru terkait dengan ketidaksetaraan akses terhadap teknologi. Meskipun *e-government* bertujuan untuk menyediakan akses informasi yang lebih luas, ketidakmerataan akses terhadap teknologi dapat memperburuk kesenjangan digital, di mana sebagian masyarakat mungkin tidak dapat mengakses informasi publik secara efektif. Terutama di negara-negara berkembang atau daerah yang terisolasi, terbatasnya infrastruktur teknologi dapat menjadi

hambatan dalam upaya meningkatkan transparansi administrasi publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang memadai tersedia bagi semua lapisan masyarakat untuk memastikan bahwa manfaat dari *e-government* dapat dirasakan secara merata (van Dijk, 2023).

Pada akhirnya, implementasi *e-government* tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi publik, tetapi juga untuk memperkuat prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun teknologi digital menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan, keberhasilannya bergantung pada kebijakan yang bijaksana dalam pengelolaan data, serta perhatian terhadap kesenjangan digital yang dapat memengaruhi inklusivitas dan keadilan dalam pemerintahan. Dengan pendekatan yang tepat, *e-government* dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memperkuat transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

F. Pengaruh Demokrasi Digital terhadap Aktivisme Sosial

Demokrasi digital merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, memungkinkan keterlibatan yang lebih langsung dalam pengambilan keputusan publik. Aktivisme sosial, yang berfokus pada perubahan sosial melalui mobilisasi publik dan advokasi, telah berkembang dengan pesat berkat kemajuan teknologi digital. Di era digital ini, *platform online* seperti media sosial, blog, dan forum diskusi telah menjadi alat penting bagi aktivisme sosial untuk mencapai audiens yang lebih luas, mengorganisir kampanye, dan mendorong perubahan sosial yang signifikan. Dalam konteks ini, demokrasi digital berperan penting dalam memperkuat dan mempercepat gerakan sosial dengan menawarkan saluran alternatif untuk komunikasi dan mobilisasi.

Di era digital, teknologi informasi memungkinkan penyebaran informasi dengan lebih cepat dan lebih efisien. Aktivis sosial dapat memanfaatkan *platform* digital untuk menyebarluaskan isu-isu yang mereka angkat kepada publik

secara luas dan instan. Sebagai contoh, media sosial memungkinkan individu dan kelompok untuk mengorganisir protes, kampanye kesadaran, atau gerakan sosial lainnya tanpa bergantung pada media tradisional yang seringkali dibatasi oleh regulasi atau kepentingan tertentu. Kemudahan akses informasi dan kemampuan untuk berinteraksi dengan audiens global membuka peluang baru bagi aktivisme sosial untuk berkembang dan mempengaruhi opini publik. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram telah digunakan dalam berbagai gerakan sosial besar, seperti Gerakan #MeToo dan protes terkait perubahan iklim, untuk menghubungkan orang-orang yang memiliki tujuan serupa dan menggerakkan perubahan yang signifikan di tingkat global (Jenkins, 2006).

Selain itu, demokrasi digital memungkinkan aktivis untuk mengakses dan memanfaatkan berbagai sumber daya digital, seperti petisi *online*, penggalangan dana digital, dan alat komunikasi digital lainnya, yang memungkinkan pengorganisasian gerakan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi. Sebagai contoh, petisi online yang dapat dengan mudah dibagikan dan ditandatangani oleh siapa saja dengan akses internet telah menjadi salah satu alat utama dalam banyak gerakan sosial. Penggunaan *platform crowdfunding* juga memberikan peluang bagi aktivis untuk mendanai kampanye sosial atau proyek-proyek perubahan sosial tanpa bergantung pada sponsor atau sumber daya tradisional. Proses ini meningkatkan kemandirian gerakan sosial, memungkinkan kelompok masyarakat untuk mengumpulkan dana secara langsung dari individu yang memiliki kepentingan yang sama tanpa melibatkan badan atau organisasi besar.

Namun, meskipun demokrasi digital memperluas ruang untuk aktivisme sosial, ada juga tantangan dan risiko yang muncul. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh aktivisme sosial di era digital adalah masalah keamanan dan privasi. Aktivis yang terlibat dalam perjuangan untuk hak asasi manusia atau kebebasan sipil seringkali menjadi target pemantauan dan pengawasan oleh pemerintah atau kelompok yang berlawanan

dengan tujuan mereka. Penggunaan teknologi digital yang melibatkan pengumpulan data pribadi dan aktivitas daring dapat menempatkan individu yang terlibat dalam aktivisme sosial pada risiko pengawasan atau bahkan represifitas. Oleh karena itu, penting bagi para aktivis untuk memahami risiko ini dan menggunakan teknologi secara hati-hati, dengan memperhatikan masalah privasi dan keamanan data.

Selain itu, digitalisasi juga dapat menciptakan kecenderungan untuk "aktivisme jempol," di mana keterlibatan publik dalam gerakan sosial hanya terbatas pada tindakan simbolis atau seperti menekan tombol "like" tanpa keterlibatan yang lebih dalam. Fenomena ini sering disebut sebagai "slactivism," yang menunjukkan bahwa meskipun ada banyak dukungan digital, kontribusi nyata untuk perubahan sosial mungkin terbatas pada aktivitas *online* tanpa tindakan nyata di dunia fisik. Hal ini dapat menurunkan dampak yang sebenarnya dari gerakan sosial dan mereduksi aktivitas sosial yang signifikan menjadi sekadar tanda dukungan yang tidak memiliki konsekuensi nyata.

Namun, meskipun tantangan ini ada, pengaruh demokrasi digital terhadap aktivisme sosial tetap besar. Kemampuan untuk menghubungkan individu dan kelompok di seluruh dunia, untuk menyebarkan informasi secara cepat, dan untuk mengorganisir kampanye dengan lebih efisien telah mengubah wajah aktivisme sosial. Gerakan-gerakan sosial kini dapat berkembang lebih cepat, lebih jauh, dan lebih terkoordinasi, berkat kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital yang ada. Dengan demikian, demokrasi digital telah menyediakan ruang yang lebih luas bagi aktivisme sosial untuk tumbuh, dengan potensi dampak yang lebih besar terhadap perubahan sosial global.

I. Keseimbangan antara Keterbukaan dan Pengendalian dalam Demokrasi Digital

Demokrasi digital mengandalkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang lebih besar dalam pengambilan keputusan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini,

internet dan media sosial memberikan *platform* bagi warga untuk mengakses informasi secara bebas, berinteraksi dengan pihak pemerintah, dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Keterbukaan ini dianggap sebagai pilar utama demokrasi digital, karena memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah terlibat dalam proses politik dan mengakses data yang relevan. Namun, keterbukaan ini sering kali memunculkan tantangan terkait dengan pengendalian informasi, yang bisa merusak kualitas diskursus publik dan memperburuk polarisasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kebebasan berekspresi dan pengendalian yang diperlukan untuk melindungi nilai-nilai demokrasi, keamanan, dan integritas sosial.

Keterbukaan dalam demokrasi digital memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara cepat dan transparan. Pemerintah dan lembaga publik di berbagai negara memanfaatkan *platform* digital untuk menyebarkan informasi mengenai kebijakan, keputusan, dan proses legislatif. Dalam hal ini, internet dapat bertindak sebagai saluran yang mempercepat komunikasi antara pemerintah dan warga negara. Selain itu, demokrasi digital memberi ruang bagi warga negara untuk mengungkapkan pandangan, berbagi opini, dan berpartisipasi dalam diskusi publik secara lebih bebas. Peran media sosial dalam menyediakan ruang untuk diskusi terbuka memungkinkan pelibatan berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik itu dalam ranah politik, ekonomi, ataupun sosial. Akses yang lebih besar terhadap informasi dapat mengurangi ketimpangan informasi yang sebelumnya terjadi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu publik, dan memberi pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan yang lebih responsif dan akuntabel (Benkler, 2006).

Namun, di sisi lain, keterbukaan yang begitu luas juga membawa tantangan besar terkait dengan penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan (disinformasi) dan polarisasi yang semakin tajam. Media sosial, meskipun memungkinkan partisipasi yang lebih luas, juga menjadi saluran yang mudah untuk

disalahgunakan dalam menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau propaganda politik yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Dalam banyak kasus, platform digital telah digunakan untuk menyebarkan narasi-narasi yang tidak berdasar yang dapat mempengaruhi pandangan publik atau bahkan mengubah hasil pemilu. Konten yang bersifat sensasional sering kali lebih mudah menarik perhatian audiens dibandingkan dengan informasi yang lebih objektif dan berbasis fakta. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya misinformasi yang berpotensi membingungkan publik dan memperburuk polarisasi dalam masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pengendalian yang tepat dalam kerangka demokrasi digital. Pengendalian ini bukan berarti membatasi kebebasan berbicara, namun lebih kepada menciptakan regulasi yang memastikan informasi yang beredar di ruang digital adalah akurat dan tidak membahayakan integritas sosial dan politik. Salah satu cara untuk mencapai pengendalian ini adalah dengan memperkenalkan regulasi yang mengatur *platform* digital agar bertanggung jawab atas konten yang disebar. Beberapa negara telah mulai mengimplementasikan kebijakan yang mewajibkan *platform* media sosial untuk melakukan verifikasi terhadap konten yang beredar, menandai informasi yang salah, dan memberi sanksi kepada mereka yang terbukti menyebarkan disinformasi. Selain itu, transparansi dalam algoritma yang digunakan oleh *platform* digital juga menjadi penting agar publik dapat memahami bagaimana informasi disebar dan siapa yang mendominasi ruang digital tersebut.

Namun, pengendalian dalam konteks demokrasi digital juga harus dilakukan dengan hati-hati. Kebijakan yang terlalu ketat atau pengawasan yang berlebihan dapat mengancam kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan berekspresi, privasi, dan hak untuk mengakses informasi, dalam setiap kebijakan pengendalian yang diterapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait seharusnya tidak dimanfaatkan untuk menekan oposisi atau

membatasi ruang diskusi publik. Dalam hal ini, pengendalian informasi perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada regulasi yang menghormati hak-hak individu (Gillespie, 2018).

Pada akhirnya, keseimbangan antara keterbukaan dan pengendalian dalam demokrasi digital memerlukan kolaborasi antara pemerintah, *platform* digital, dan masyarakat sipil. Pengaturan yang tepat dapat menciptakan ruang digital yang bebas, adil, dan aman bagi semua pihak, sekaligus mencegah penyalahgunaan ruang tersebut untuk kepentingan tertentu yang merugikan masyarakat luas. Dalam konteks ini, prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keamanan informasi harus dijaga dengan seimbang, untuk menciptakan ekosistem digital yang mendukung partisipasi yang konstruktif dan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of economic perspectives*, 31(2), 211-236.
- Arianto, B., & Handayani, B. (2022). Studi Fenomenologi Youtube Sebagai Saluran Pembelajaran Kewargaan Desa Sukoharjo Kabupaten Sleman. *Jurnal DIALOGIKA: Manajemen dan Administrasi*, 3(2), 92-106.
<https://doi.org/10.31949/dialogika.v3i2.8717>
- Arianto, B., & Handayani, B. (2023). Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Digital Kewargaan: Studi Etnografi Digital. *ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media*, 2(02), 220-236. <https://doi.org/10.62022/arkana.v2i02.5813>
- Arianto, B. & Rani. (2024). Pengantar Social Engineering. Borneo Novelty Publishing.
<https://doi.org/10.70310/mswecg43>
- Arianto, B. (2023). Tata kelola Media Sosial sebagai Institusionalisasi Praktik Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia. *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 16(2), 106-127.
<https://doi.org/10.24123/jati.v16i2.5644>
- Benkler, Y. (2006). *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. Yale University Press.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). *Using ICTs to Create a Culture of Transparency: E-Government and Social Media as Openness and Transparent Government Tools*. *Government Information Quarterly*.
- Boulianne, S. (2015). *Social Media Use and Participation: A Meta-analysis of Current Research*. *Information, Communication & Society*, 18(5), 524-538.
- DiMaggio, P., Hargittai, E., Neuman, W. R., & Robinson, J. P. (2001). *Social Implications of the Internet*. *Annual Review of Sociology*, 27(1), 307-336.
- Enli, G. (2017). *Social Media and Political Participation: The Role of Digital Media in Political Engagement*. Palgrave

- Macmillan.Enli, G. S., & Moe, H. (Eds.). (2017). *Social media and election campaigns: key tendencies and ways forward*. Routledge.
- Castells, M. (2013). *Communication Power*. Oxford University Press.
- Chadwick, A. (2013). *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford University Press.
- Dahlberg, L. (2011). "Re-constructing digital democracy: An outline of four 'positions'." *New Media & Society*, 13(6), 855-872.
- Dunleavy, P., Margetts, H. Z., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). "New Public Management Is Dead—Long Live Digital-Era Governance." *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467-494.
- Gillespie, T. (2018). "Platforms Are Not Intermediaries: A Brief History of the Debate over Facebook and Free Speech." *Media, Culture & Society*, 40(6), 831-841.
- Helsper, E. (2021). *Digital inclusion: an analysis of social disadvantage and the information society*. Department for Communities and Local Government.
- Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). *Democracy's Fourth Wave? Digital Media and the Arab Spring*. Oxford University Press.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York University Press.
- Lazer, D. M., et al. (2018). *The Science of Fake News*. *Science*, 359(6380), 1094-1096.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K., & Cook, J. (2017). *Beyond Misinformation: Understanding and Coping with the "Post-Truth" Era*. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353-369.
- Lievrouw, L. A. (2011). *Alternative and Activist New Media*. Polity Press.
- Marwick, A. E., & Boyd, D. (2011). *To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter*. *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, 17(2), 139-158.

- Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think*. Houghton Mifflin Harcourt.
- McChesney, R. W. (2013). *Digital Disconnect: How Capitalism Is Turning the Internet Against Democracy*. New Press.
- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2008). *Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation*. MIT Press.
- Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*. Princeton University Press.
- Norris, P. (2001). Digital parties. *Civic engagement and online democracy*.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Crown Publishing.
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2019). *Fighting misinformation on social media using crowdsourced judgments of news source quality*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(42), 10443-10448.
- Shirky, C. (2011). *The Political Power of Social Media*. *Foreign Affairs*, 90(1), 28-41.
- Solove, D. J. (2021). *Understanding Privacy*. Harvard University Press.
- Tufekci, Z. (2014). *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. Yale University Press.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). "The Spread of True and False News Online." *Science*, 359(6380), 1146-1151.
- Van Deursen, A. J., & Van Dijk, J. A. (2014). *Digital skills: Unlocking the information society*. Springer.
- Van Dijk, R. E. (2023). Ambitious Women: Hidden within the Party?. *Politics of the Low Countries*, 5(3).
- Zuboff, S. (2023). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

TENTANG PENULIS



Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya

Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak. Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya, Banten. Penulis yang lahir pada 4 November ini menyelesaikan pendidikan terakhir pada Magister (S2) Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (2014), Magister (S2) Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FEB) Universitas Islam Indonesia (2018) Yogyakarta dan Profesi Akuntansi (Ak) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto (2023). Penulis saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya Periode 2022-2026. Selain menjadi pengajar, penulis juga menjadi peneliti senior dan Direktur Eksekutif *Institute for Digital Democracy* (IDD) Yogyakarta. Minat penelitian; Akuntansi Forensik, Akuntansi Sektor Publik, Forensik Digital dan Media Sosial. Penulis dapat dihubungi melalui email: ariantobambang2020@gmail.com



Dr. Oktiva Anggraini, M.Si.
Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Dr. Oktiva Anggraini. Penulis lahir di Yogyakarta pada tanggal 28 Oktober 1968. Pada tahun 1993, penulis lulus dari FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan gelar Sarjana Hubungan Internasional. Selanjutnya, pada tahun 1997, penulis menyelesaikan Program Pascasarjana Ilmu Politik di UGM. Tahun

2017, ia berhasil meraih gelar Doktor program Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan di Sekolah Pascasarjana UGM. Saat ini penulis mengajar di Prodi Administrasi Publik, FISIPOL, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Widyamatarem (UWM), dan Universitas Terbuka Indonesia. Penulis memimpin Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat UWM (2018-2024) dan melakukan penelitian dengan konsentrasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan pariwisata berkelanjutan di daerah pedesaan. Penulis pada tahun 2023 melakukan dua penelitian. Pertama, sebuah penelitian yang didanai oleh BRIN mengkaji budidaya maggot meningkatkan ketahanan pangan keluarga di Margoagung Sleman dan Cucukan Klaten. Studi lain mengkaji Peran Multi Helix Dalam Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Masyarakat Penunjang Yogyakarta *Smart Environment*. Penulis menjabat sebagai Ketua *The Greater Courage*, lembaga yang bergerak di bidang *empowerment*. Aktif tampil dalam beberapa skema pemberdayaan masyarakat, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan swasta, dengan keahlian di bidang pengembangan masyarakat, hubungan masyarakat, dan penulisan penelitian ilmiah. Penulis dianugerahi Penghargaan Tutor Terbaik dari Universitas Terbuka Indonesia pada tahun 2020. E-mail: oktivannggraini@widyamatarem.ac.id



Ludiro Madu, S.I.P., M.Si.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Yogyakarta

Ludiro Madu, M.Si. Dosen senior di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Indonesia (1995-sekarang). Lulus dari Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta) untuk meraih gelar Sarjana dan Magister. Memperoleh beasiswa untuk pelatihan nasionalisme di Central European University (2008, Budapest, Hongaria); pelatihan tentang Resolusi Konflik dan Perdamaian di Universitas Uppsala

(2009, Uppsala, Swedia; dan, Institut Studi Sosial (2020, Dhaka, Bangladesh. Menjadi *local/host coordinator* Indonesian Arts and Culture Scholarship (IACS) dari tahun 2013-2019 untuk Kementerian Luar Negeri Indonesia di UPN “Veteran” Yogyakarta. Ludiro mengkhususkan penelitiannya tentang isu-isu ASEAN, Kebijakan Luar Negeri/Diplomasi Indonesia dan kaitan antara isu internet dengan HI dan menjadi peneliti di Pusat Studi Pertahanan, UPN “Veteran” Yogyakarta. Selain menulis di jurnal-jurnal akademik domestik dan internasional, Ludiro secara aktif menulis opini tentang spesialisasi penelitian itu di beberapa harian Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta), Suara Merdeka (Semarang) dan opini online (quireta.com, kompasiana.com). Pada Kompasianival 2022, menjadi finalis Best Teacher Kompasiana Award 2022. Beberapa buku telah dipublikasikan, seperti Politik Reformasi Ekonomi di Thailand (2004), Indonesia: Diplomasi Vaksin di Tengah Rivalitas AS dan China (2021), Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Ekspor Kopi di Rusia di Masa Pandemi (2021), dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada Masa Pemerintahan Joko Widodo, 2014-2019 (2023). Bersama beberapa kolega di jurusan HI dan lembaga di luar kampus telah mengedit beberapa buku, seperti: Perbatasan RI (2008), Isu Bencana dalam Hubungan Internasional (2012), Isu-isu Maritim (2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019). Alamat email penulis: ludiro@gmail.com